

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN OLEH PELAKU DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus Putusan No. 166/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Mks)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Islam Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

HARDIAN VINA KALLA

NIM: 10300112034

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hardian Vina Kallaa
NIM : 10300112034
Jurusan /Prodi : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas/Program : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Faisal 14 Nomor 37
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap
Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Pelaku di Bawah
umur (Studi Kasus Putusan
No.166/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Mks)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUD DİN
M A K A S S A R
Samata, 25 Februari 2016
Penyusun,

Hardian Vina Kalla
NIM:10300112034

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Pelaku di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan No. 166/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Mks)”, yang disusun oleh Hardian Vina Kalla, NIM:10300112034, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari senin, tanggal 21 Maret 2016, bertepatan dengan 14 Jumadil Akhir 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 21 Maret 2016.
12 Jumadil akhir 1437 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Darussalam S, M.Ag (.....)
Sekretaris : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag (.....)
Munaqisy I : Prof. Dr. H. Ahmad Sewang, M.A(.....)
Munaqisy II : Dr. Marilang, S.H, M.Hum (.....)
Pembimbing I : Dra. Nila Sastrawati, M.Si (.....)
Pembimbing II : Andi Safriani, S.H, M.H (.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP: 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR



Puji syukur terpanjat kepada Allah swt., atas semua karunia dan rahmat-NYA serta atas semua cahaya, ide dan inspirasi yang diberikan-NYA sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Pelaku Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan No.166/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Mks)”. Serta salam dan salawatnya yang terhaturkan tiada henti kepada Rasulullah Muhammad saw., sebagai nabi terakhir dan junjungan manusia yakni pembawa cahaya kehidupan dan inspirasi jiwa, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah mengikuti ajarannya hingga akhir nanti.

Penulis ingin mengekspresikan cinta dan kasih sayang yang mendalam serta penghargaan secara khusus kepada yang telah mau berbagi suka dan duka, yaitu Keluarga Ayahanda dan Ibunda tercinta (A. Muh. Kalla dan Rahmawati Pallewai), yang telah mendidik dengan tidak kenal lelah tanpa mengharapkan imbalan apapun, terimakasih atas perhatian, do’a, cinta dan kasih sayangnya serta saudaraku (kakak M. Solihin Kalla, Harnilawati Kalla, dan adikku M. Rickhal Kalla) yang selalu memberikan semangat dan cerita cinta yang senantiasa membuatku tersenyum menghadapi hidup ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat hambatan mulai dari tahap persiapan sampai pada saat penelitian, namun Alhamdulillah atas bimbingan, arahan kerja sama, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam kesempatan ini dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Musafir Pababari M. Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar serta Seluruh Wakil Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Bidang Akademik Bapak Dr. H. Abdul Halim Talli S.Ag, M.ag. Bidang Administrasi Umum Bapak Hamsir, SH. M.Hum. Bidang Kemahasiswaan Bapak Dr. M. Saleh Ridwan, M.Ag.
3. Ibu Dra. Nila Sastrawati, M.Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan serta Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan meluangkan waktu dan pikiran yang tiada terhingga untuk membimbing dalam penyelesaian skripsi ini, dan Ibu Dr. Kurniati, S. Ag, M. Hi selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan nasehat, petunjuk, saran dan kritikan, dalam menyusun skripsi ini.
4. Ibu Andi Safriani, SH. MH. Selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan serta memberikan masukan-masukan keilmuan, arahan, kritik dan saran dengan penuh kesabaran yang tiada terhingga dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang pernah mengajar dan membimbing penulis. Permohonan maaf apabila ada perbuatan, ucapan serta tingkah laku yang tidak sepatutnya pernah penulis lakukan.
6. Seleruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Bapak Prof. Dr. Sabri Samin M.ag, Drs. Hamzah Hasan, M.HI., Dr. Alimuddin, S.Ag., M.Ag., Drs. Dudung Abdullah, M, Ag., Ibu Dra. H. Rahmatiah, M.Ag., serta

mohon maaf yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas Ilmu Pengetahuan selama Proses mengajar serta membimbingnya yang sangat banyak memberikan masukan kepada penulis. Permohonan maaf apabila ada perbuatan, ucapan serta tingkah laku yang tidak sepatutnya pernah penulis lakukan.

7. Staf Jurusan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan kak Cenci yang telah banyak memberikan Informasi penting dan masukan kepada penulis. serta Bapak dan Ibu staf administrasi Tata Usaha dan perpustakaan FSH yang senangtiasa membantu segala kebutuhan perkuliahan serta melayani dan menyediakan referensi yang penulis butuhkan selama dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Suparman Nyompa, SH. MH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang khusus menangani perkara Anak, terima kasih telah memberikan kemudahan kepada penulis saat melakukan wawancara Hakim di instansi tersebut serta Staf Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Makassar Ibu Tia dan Kakak Kiki, yang telah memberikan ruang dan waktu serta kerja sama yang baik selama penelitian.
9. Kepala Bagian Staf Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Lembaga Permasyarakatan Kelas I Makassar yang telah memberikan kemudahan dan waktu untuk melakukan wawancara Andikpas selama penelitian.
10. Keluargaku (Alm. Fung Lako, Fung Here, Fung Hamka, Dr. Hasni, Om Syahrudin, Amel, Ida, dll).
11. Sahabat-sahabatku Radiaty, Ummul, Husnah, Nilma, Khaer, Agus, Anzar, Fuji dll, yang senantiasa berbagi cerita, cinta dan kehidupan serta semangat dalam

suka dan duka, serta saudara-saudari seperjuangan jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, dan teman-teman Bidikmisi. Terima kasih atas partisipasinya yang senantiasa berbagi kegembiraan, kelucuan dan memberikan motivasi.

12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Semoga Allah swt., membalas segala kebaikan kalian.

Penulis menyadari bahwa sripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan kelemahan yang dimiliki. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan semoga Allah swt., meridhoi segala usaha yang telah kita lakukan selama ini.



Makassar, 13 Januari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-14
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	8
C. Rumusan masalah.....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Pikir.....	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN TEORITIS	15-32
A. Tinjauan Umum tentang Anak	15
1. Pengertian Anak	15
2. Tindak Pidana Anak	18
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerkosaan.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2. Tindak Pidana Pemerkosaan.....	22
C. Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana.....	27
BAB III METODELOGI PENELITIAN	33-37
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sumber Data.....	35
D. Metode Pengumpulan Data	35

E. Instrumen Penelitian.....	36
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38-67
A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Tinjauan Hukum Positif terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku di bawah Umur.....	39
1. Unsur Barang Siapa.....	40
2. Unsur dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan ..	40
3. Unsur Bersetubuh	41
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan oleh Pelaku di Bawah Umur.....	42
D. Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku di - Bawah umur Putusan No.166/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Mks.....	49
1. Duduk perkara	49
2. Dakwaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	52
3. Pertimbangan Pengadilan	60
4. Amar Putusan	62
BAB V PENUTUP	68-69
A. Kesimpulan	68
B. Implikasi Penelitian.....	69
KEPUSTAKAAN	70
PEDOMAN WAWANCARA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel beriku :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

ا	<i>fathah</i>	a	a
ي	<i>kasrah</i>	i	i
و	<i>dammah</i>	U	u

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah dan yaa'</i>	Ai	a dan i
أَوْ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا...	Fathah dan alif atau yaa'	a	a dan garis di atas
ى	Kasrah dan yaa'	i	i dan garis di atas
و	Dhammah dan waw	u	u dan garis di atas

Contoh:

مات : *maata*

رَمَى : *ramaa*

قِيلَ : *qiila*

يَمُوتُ : *yamuutu*

4. *Taa' marbuutah*

Transliterasi untuk *taa' marbuutah* ada dua, yaitu *taa' marbuutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *taa' marbuutah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *taa' marbuutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *taa' marbuutah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

الْأَطْفَالُ الرَّوَضَةُ : *raudah al- atfal*

الْقَاضِيَةُ الْمَدِينَةُ : *al- madinah al- fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanaa*

نَجَّيْنَا : *najjainaa*

الْحَقُّ : *al- haqq*

نُعَمَّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ) maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* menjadi i.

Contoh :

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah (az-zalزالah)*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَامُرُونَ : *ta’muruna*

النَّوْغُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur’an (dari *Al-Qur’an*), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fizilaal Al-Qur’an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz al- Jalaalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ *diinullah* بِاللَّهِ *billaah*

Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalaalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh :

hum fi rahmatillaah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

Wa ma muhammadun illaa rasul

Inna awwala baitin wudi' alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan

Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	= <i>subhanallahu wata'ala</i>
saw	= <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
QS.../...4	= QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
KUHP	= Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUHAP	= Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
UU	= Undang-undang

t.t. = Tanpa tempat penerbit

t.th. = Tanpa tahun penerbit



ABSTRAK

NAMA : Hardian Vina Kalla
NIM : 10300112034
JURUSAN : Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan
JUDUL : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana
Pemeriksaan Oleh Pelaku Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan
No. 166/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks)

Pokok masalah Penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum islam terhadap tindak pidana pemeriksaan oleh pelaku di bawah umur (Studi Kasus Putusan No. 166/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks)? pokok masalah tersebut selanjutnya di bagi kedalam beberapa sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap tindak pidana pemeriksaan yang dilakukan oleh pelaku di bawah umur. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana pemeriksaan yang dilakukan oleh pelaku di bawah umur. 3) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemeriksaan yang dilakukan oleh pelaku di bawah umur putusan No. 166/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan normatif syar'i dan pendekatan komparatif dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada instansi Pengadilan Negeri Makassar untuk mencari data yang diperlukan terkait dengan pembahasan skripsi ini dengan menggunakan metode interview, yakni pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap hakim terkait masalah yang diputus, kemudian mengulas, dan menyimpulkannya.

Hasil penelitian dan pembahasan, menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pidana terhadap kasus pemeriksaan yang dilakukan oleh pelaku di bawah umur, yaitu telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 KUHP tentang tindak pidana pemeriksaan, UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak, begitupun dengan hukum Islam yang tertera dalam QS Al-Isra'/17:32 tentang melarang umat muslim untuk untuk mendekati zina.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum baik berupa keterangan saksi korban, saksi ahli, maupun pengakuan terdakwa sendiri yang semuanya bersesuaian dan kemudian hakim melihat beberapa pertimbangan hukum dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dan Hakim juga melihat pada saat persidangan apakah terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan dapat menerima sanksi hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang seadil-adilnya, terkait dengan Putusan No. 166/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Mks, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa yaitu selama 7 (tujuh) tahun penjara atau ½ dari hukuman orang dewasa serta tanggungan biaya perkara Rp.2000,- dan ditahan dalam Lapas Kelas I Makassar sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan sekarang.

Implikasi dari penelitian ini adalah agar kiranya anak bisa di didik sejak dini dan mengajarkan tentang hal-hal yang baik agar anak tidak terjerumus ke tindakan yang salah yang membuat anak bisa dipidana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan tunas bangsa dan generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa yang telah melekat hak-haknya sejak lahir. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita dan perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang memiliki peran penting untuk menjamin kelangsungan bangsa dan negara dimasa depan.¹ Maka anak tersebut berhak mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik maupun mental.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 Anak adalah seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan pengembangan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial, Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Dengan adanya jaminan dalam UUD 1945 tersebut bahwa anak dianggap belum memiliki kemampun untuk berdiri sendiri baik itu secara rohani, jasmani maupun sosial.

Anak juga bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan titipan dari tuhan yang diberikan kepada orang tuanya untuk di didik dan dilindungi sebagai penerus bangsa

¹Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta:Kencana, 2010), h.187.

(undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak)²², oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh yang selaras dan seimbang.

Semakin tingginya nilai sebuah peradaban dari masa ke masa tentunya mampu memberikan kemajuan bagi kehidupan manusia utamanya kepada anak, namun tidak dapat dilupakan juga bahwa disisi lain dari kemajuan yang ditimbulkan tidak selamanya akan membawa dampak yang baik, akan tetapi akan membawa dampak yang buruk pula terhadap manusia jika semuanya itu tidak sesuai pada tempatnya, salah satu dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dewasa ini khususnya dalam bidang informasi dan elektronik yaitu meningkatnya kuantitas dan kualitas dari kejahatan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini ternyata memperlihatkan perilaku anak yang menjurus kepada tindakan-tindakan kejahatan, seperti pemerkosaan, pencabulan, pencurian, perkelahian anak pelajar dan lain-lain, sehingga anak berhadapan dengan proses hukum yang sama dilakukan oleh orang dewasa, terutama tindak pidana Pemerkosaan yang pada umumnya kebanyakan dilakukan oleh laki-laki berakal (dewasa/baligh) terhadap perempuan, tetapi yang mengejutkan apabila seorang anak yang masih dibawa umur telah melakukan suatu tindakan tercela atau tindak pidana Pemerkosaan terhadap perempuan, seperti kasus yang terjadi sekarang ini anak yang masih dibawa umur melakukan tindakan kejahatan perkosaan terhadap perempuan yang lebih dewasa darinya, tindakan anak tersebut sangat tidak mencerminkan nilai moral yang ada dalam dirinya, dimana anak yang

²²Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Perundangan tentang Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustita, 2010), h.15.

seharusnya dididik sejak dini untuk menuju kearah yang lebih baik tetapi bertindak sebagai seorang anak yang nakal yang melakukan perbuatan kejahatan yang tercela.

Seperti realitas yang terjadi sekarang ini banyak kejadian dan kasus yang menimpa sebagian manusia yang menjadikan hidupnya tidak nyaman bahkan menyesali keberadaannya di dunia untuk menjalani kehidupan. Salasatu contohnya yang sangat relevan adalah pemerkosaan, oleh karena itu pemerkosaan diklasifikasikan sebagai salasatu bentuk kejahatan yang ada di Indonesia bahkan diseluruh dunia dan bagi yang melakukannya diancam dengan sanksi yang tidak ringan.³ Perkosaan itu dilarang sebab perbuatan tersebut melanggar hak-hak pribadi perempuan.

Di Indonesia pada tahun 2015 kemarin yang penulis dapatkan dari beberapa sumber di sosial media tercatat kasus pemerkosaan catatan tahunan (catahu) 2015, Komnas Perempuan menyebut 1.033 kasus pemerkosaan, 834 kasus pencabulan, 184 kasus pelecehan seksual, 74 kasus kekerasan seksual lain, 46 kasus melarikan anak perempuan dan 12 kasus percobaan perkosaan dari kasus yang dilaporkan, dan landasan hukum tersebut tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 285, 286, 287, 290, dan 291.⁴

Paparan mengenai hasil penelitian tersebut dapat dijadikan tolak ukur bahwa perkosaan itu terjadi dapat disebabkan oleh kedekatan secara relasional antara korban dengan pelaku biasa terjadi *pertama*. Pelaku tergoda untuk memanfaatkan kelemahan

³Iin Luqmansari, "Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta (No.14/Pid B/2008)", *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009), h. 2.

⁴Peran Anggota dalam Penghapusan Kemiskinan Perempuan di Indonesia, Arzeti Bilbina Setyawan, *Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak-Hak Kekerasan Seksual* (t.t, t.th) h.5.

korban atau berasumsi korban tidak akan mampu melawan kekuatannya. *Kedua*, pelaku berasumsi korban memberikan peluang untuk bersetubuh. *Ketiga*, pelaku tergoda oleh kecantikan, kemulusan dan hal-hal lain seperti pakaian yang mempertontonkan aurat yang secara biologis merangsangnya untuk bersetubuh.⁵

Menurut R. Sugandi, yang dimaksud dengan perkosaan adalah “seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya, dengan ancaman kekerasan yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani (R. Sugandhi, 1980:302).⁶ Dari pendapat Sugandhi menunjuk kepada suatu perkosaan yang terjadi secara tuntas, artinya pihak pelaku sebagai laki-laki yang pemerkosa telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai (menegeluarkan air mani).

Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Seiring di media sosial maupun koran diberitakan terjadi tindak pidana pemerkosaan, jika dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri dan akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana perkosaan saat ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yg relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di daerah yang relatif masih memegang nilai-nilai tradisi dan adat istiadat.

⁵Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan* (Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), h. 69.

⁶Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, h.401.

Pemeriksaan oleh beberapa kalangan dapat dikelompokkan kedalam tindak kekerasan terhadap perempuan, bahkan dalam beberapa kasus yang sering muncul, perkosaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap istri, anak (kemenakan), atau perempuan yang serumah dengannya, sehingga muncullah berbagai istilah “Marital Rape, Sexual abuse and Incest. Yang lebih dikenal secara umum yaitu sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan.

Dan dari data yang penulis peroleh di Pengadilan Negeri Makassar tercatat kasus pemeriksaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebanyak 12 kasus pada tahun 2015 termasuk kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar Putusan No.166/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Mks yang dilakukan M.R Alias R (15 tahun) bersama dua orang temannya yang juga masih dibawah umur (anak) yang mengakibatkan korbannya mengalami trauma. Pelaku melakukan aksinya di bawah jembatan tepatnya di samping wisma Benhil Jl. Urip Sumihardjo, karena perbuatannya maka pelaku telah melanggar pasal 285 KUHP tentang pemeriksaan, maka oleh jaksa penuntut umum memberikan terdakwa/pelaku hukuman 8 (delapan) tahun penjara dan oleh pengadilan Negeri makassar terdakwa dijatuhi hukuman 7 (tujuh) tahun dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Perilaku anak tersebut tidak cukup hanya dipandang sebagai kenakalan biasa, tidak jarang perbuatan mereka tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yg telah disepakati yg menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.

Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan pada ketentuan Perundang-undangan yg tercantum dalam KUHP BAB XIV Buku kedua tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur

kepada tindak pidana perkosaan seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 285 merupakan suatu tindak kejahatan yang telah ditetapkan aturannya yang apabila dilanggar akan di kenakan sanksi atau pidana kurungan, yang menyatakan:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.⁷

Begitupun dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt., yang tercantum dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang syari'at Islam, seperti orang yang berzina harus dicambuk 100 kali bagi pelakunya yang berstatus belum menikah atau hukuman rajam bagi pelakunya yang telah berstatus janda atau duda maupun yang sudah memiliki ikatan perkawinan, sehingga Allah swt berfirman dalam QS Al-Isra'/17:32 tentang melarang umat muslim untuk mendekati zina yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.⁸

Sementara itu hukum Islam mengatur pula hal-hal yang berkaitan dengan kasus pemerkosaan yang meliputi:

1. Pemerkosaan tanpa mengancam dengan menggunakan senjata.
2. Pemerkosaan dengan menggunakan senjata.

⁷Tim Redaksi Pustaka Yustita, *Kitab Lengkap KUHP, KUHP, KUHP, KUHP, KUHP* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), h. 557.

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Alfatih, 2013), h. 285.

Terhadap penanganan kasus perkosa berdasarkan hukum Islam tersebut diatas, maka dalam hal ini pengadilan boleh memilih salasatu diantara empat sanksi atau hukuman, yaitu: dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, misalnya: tangan kiri dipotong dan kaki kanan dipotong, diasingkan ke orang-orang atau dibuang, saat ini bisa diganti dengan pidana penjara. Penentuan pilihan hukuman tersebut dapat diputuskan oleh hakim jika dianggap paling sesuai untuk pelaku dan bisa membuat efek jera bagi yang melakukan kejahatan, sehingga bisa terwujud keamanan dan ketentraman di masyarakat.

Pentingnya peranan orang tua, keluarga dan masyarakat untuk membimbing anak yang beranjak keusia remaja, serta menjaga anak dari gangguan kejahatan dan kekerasan baik dalam maupun dari luar agar anak kelak memiliki masa depan yang cerah. karena apabila anak minim pendidikan sejak dini dan kurangnya ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang positif maka akan sangat berpengaruh terhadap sifat dan perilaku anak tersebut, sehingga anak dapat melakukan tindakan yang dilarang ataupun akan berdampak melakukan kejahatan, dan dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak yang melakukan kejahatan diusahakan agar anak jangan dipisahkan dari orang tuanya. Mengingat ancaman yang diatur oleh Undang-undang No.3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang, maka dari itu dalam memelihara kepentingan anak orang tualah yang memiliki tanggung jawab penuh untuk mendidik anak.

Dari uraian latar belakang diatas merupakan faktor yang dijadikan acuan penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Dan Hukum

Islam Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Pelaku Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan No.166/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Mks).

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan pada wilayah kota makassar khususnya pada Pengadilan Negeri Makassar. Judul proposal ini, mengembangkan sejauh mana penerapan hukum positif dan hukum Islam terhadap tindak pidana pemerkosaan oleh pelaku di bawah umur (Studi Kasus Putusan No.166/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Mks)

2. Deskripsi Fokus Penelitian

Agar tidak terjadi kesalahpahaman maka penulis mendeskripsikan definisi satu dari beberapa variabel yang dianggap penting yaitu:

- a. Tinjauan yuridis adalah menguraikan suatu pokok masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya berdasarkan hukum atau dilihat dari segi hukum yaitu berdasarkan aturan undang-undang.⁹
- b. Tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman; setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap Faraj atau dubur korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman

⁹M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum* (cet ke-2, Surabaya: Raelity Publisher, 2003), h. 84

terhadap korban, tidak termasuk hubungan seksual yang dilakukan oleh suami atau istri.¹⁰

- d. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senangtiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹¹

C. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis dapat merumuskan pokok masalahnya yaitu bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum islam terhadap tindak pidana pemerkosaan oleh pelaku di bawah umur (Studi Kasus Putusan No.166/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Mks), dan adapun sub masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku di bawah umur?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan oleh Pelaku di Bawah Umur?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemerkosaan oleh pelaku di bawah umur putusan No.166/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks ?

¹⁰Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundangan-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, (cet ke-1, Jakarta: Kencana, 2010), h. 112

¹¹Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam* (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 187.

D. *Kajian Pustaka*

Dalam kajian pustaka ini penulis akan memaparkan beberapa sumber dari yang ada dan membahas masalah tersebut yaitu:

1. Hamzah Hasan dalam bukunya yang berjudul *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Islam*. Buku ini menjelaskan tentang sanksi hukum dari perbuatan cabul dan Pemerkosaan, namun dalam buku ini tidak menjelaskan tentang bagaimana hukuman yang diberikan kepada pelaku yang masih di bawah umur.
2. Neng Djubaedah dalam bukunya yang berjudul *perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di indonesia ditinjau dari hukum islam*. Buku ini menjelaskan tentang ketentuan perzinaan atau perbuatan perkosaan dalam peraturan perundang-undangan di indonesia, namun dalam buku ini tidak menjelaskan tentang bagaimana pelanggaran norma-norma yang dilakukan pelaku di bawah umur.
3. Munandar Sulaeman dalam bukunya yang berjudul *Kekerasan terhadap Perempuan*. Dalam buku ini menjelaskan tentang Pemerkosaan suatu tindakan pemaksaan atau kekerasan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan, namun dalam buku ini tidak menjelaskan tentang sanksi pidana apa yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

E. *Kerangka Pikir*

Anak nakal adalah anak yang berusia hingga 21 tahun dan belum pernah menikah yang berperilaku menyimpang dari norma-norma, atauran-aturan dan kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat lingkungannya sehingga

merugikan dirinya sendiri, keluarganya dan orang lain yang akan mengganggu ketertiban umum, Istilah anak nakal diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*, *Juvenile* yang berarti anak-anak, anak muda dengan ciri karakteristik pada masa muda sifat khas pada priode remaja, sedangkan *Delinquency* berarti menjadi jahat, anti sosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, pengacau, dan lain-lain. ketentuan pidana terhadap anak yang melakukan kejahatan adalah paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimal ancaman pidana bagi orang dewasa.

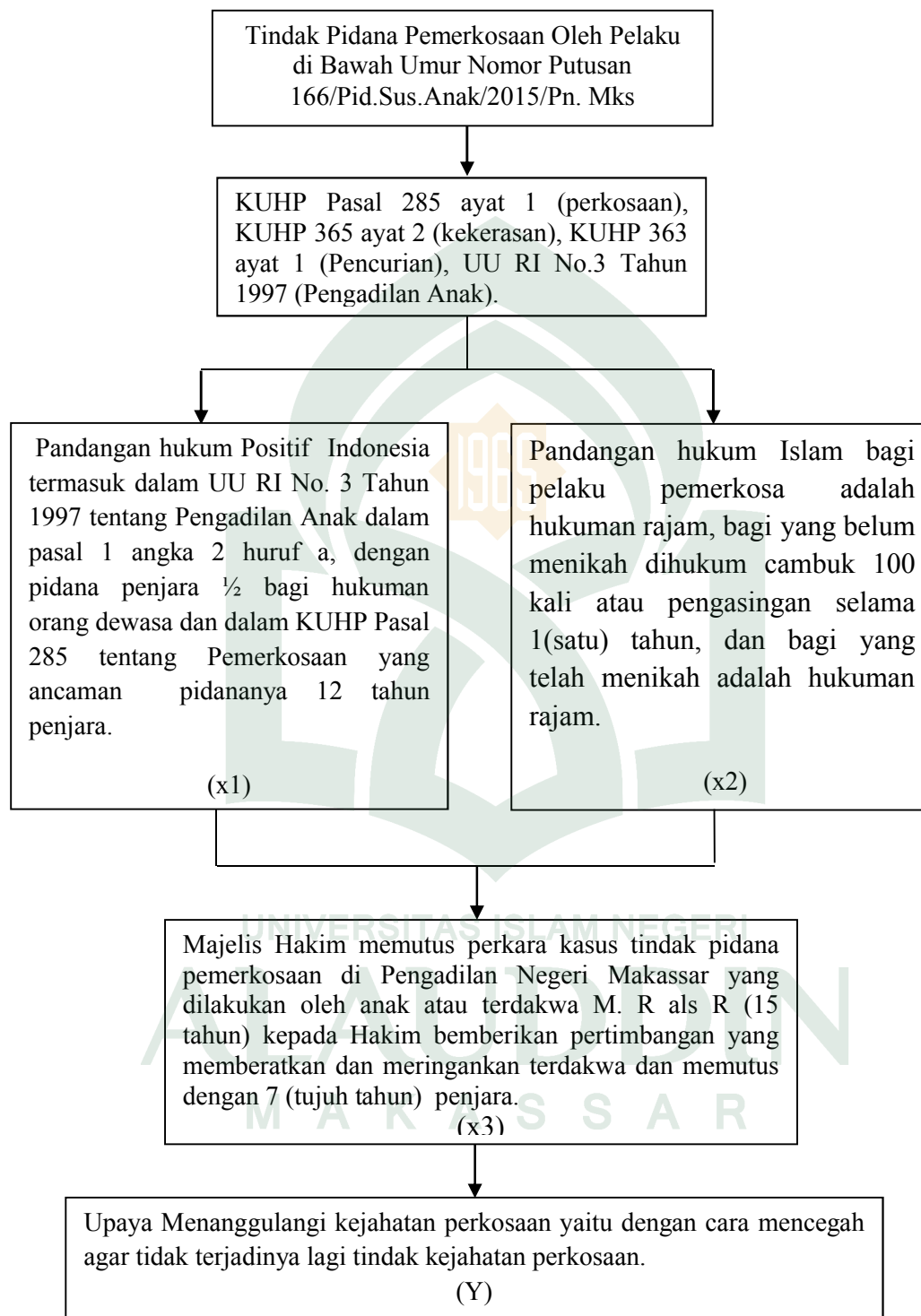
Dasar hukum tindak pidana perkosaan sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP yang tertera dalam pasal 285 tentang perkosaan dan dalam ketentuan anak pasal 45, 46, 47 yang menjelaskan bahwa batasan anak adalah sebelum usia 16 tahun dan terhadap anak tersebut apabila melakukan kejahatan, maka ketentuan yang dijatuhkan sepenuhnya diserahkan kepada hakim, kemudian dalam UU RI No. 3 Tahun 1997 dalam pasal 1 ayat 1 bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun dan belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah. Mengenai masalah kasus pemerkosaan maka terhadap tinjauan hukum positif Indonesia, telah tertera dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bab XIV mengenai kejahatan terhadap kesusilaan dan pada khususnya yang tertera dalam pasal 285 yang pada pokoknya menerangkan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh, sesuai yang penulis kaji dalam penelitian ini bahwa tindakan pemerkosaan ini dalam pandangan KUHP maka atas pelaku yang melakukan perbuatan tersebut dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun serta membayar denda atas kerugian yang dilakukannya.

Sedangkan dasar hukum Islam yang berlaku bagi pelaku pemerkosa yang dilakukan oleh anak adalah hukuman Ta'zir (sanksi) dan bagi yang belum menikah

dihukum cambuk 100 kali kemudian dilakukan pengasingan selama 1(satu) tahun dan hukuman rajam bagi pelaku yang telah menikah, sedangkan bagi korban tidak ada hukuman baginya.

Dalam kasus pemerkosaan yang telah diputus di Pengadilan Negeri Makassar, maka hakim memberikan pertimbangan dalam memutus perkara tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak. Majelis hakim melihat tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan pelaku, sesuai dengan pasal yang dikenakan pelaku M. R alias R yaitu pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dan Undang-undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, kemudian hakim menimbang berkas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dilimpahkan ke pengadilan, apakah dakwaan tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa M.R alias R dan berdasarkan pertimbangan Majelis hakim dengan melihat pelaku masih di bawah umur, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku selama 7 (tujuh) tahun penjara dan dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 2000,-.

Untuk menanggulangi kejahatan perkosaan ini, yaitu dengan upaya preventif yaitu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan perkosaan , upaya ini meliputi kegiatan berupa pemberian penyuluhan atau himbauan kepada masyarakat, khususnya kepada anak yang menginjak usia remaja, agar saling menghargai dan melindungi hak dan harga diri terutama kepada perempuan sebagai sesama ciptaan Allah swt., dengan demikian pelaku tidak hanya memuaskan hawa nafsunya sendiri tetapi juga memikirkan dampak negatif yang akan terjadi dimasa depan korban perkosaan yang secara rohani dan materil sangat dirugikan, dan terhadap khususnya kepada perempuan hendaknya berpakaian yang sopan sehingga dapat menjaga dirinya sendiri dari ancaman kejahatan perkosaan.



F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang diambil dari rumusan masalah yaitu:

- a. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku di bawah umur.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan oleh Pelaku di Bawah Umur.
- c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemerkosaan oleh pelaku di bawah umur putusan No.166/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks .

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis

Karya tulis ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum khususnya dibidang penyelesaian dalam menanggulangi kejahatan pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku anak dibawah umur dan menjadi bahan referensi bagi kalangan akademisi yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai masalah ini.

- b. Kegunaan praktis

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada para praktisi hukum yang berkompeten menangani masalah tindak pidana kejahatan khususnya pemerkosaan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Tinjauan Umum tentang Anak*

1. Pengertian Anak

Berikut ini beberapa pengertian anak yang telah disebutkan dalam Undang-undang RI yang berlaku di Indonesia:

- a. Pengertian anak menurut Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam UU RI pasal 1 ayat 1 tersebut menjelaskan:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹

- b. Pengertian anak menurut Undang-undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak dalam pasal 1 bagian 2 yaitu:

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”²

- c. Pengertian anak menurut Undang- Undang RI No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, didalam UUD RI pasal 1 bagian lima tersebut tercantum sebagai berikut:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.³

¹Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Perundangan tentang Anak*, h.66.

²Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Perundangan tentang Anak*, h.6.

³Arbiahningsih, *Keperawatan Anak konsep dan Prosedur Tindakan* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011). h. 7.

Pengertian secara yuridis yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena karena peraturan tertentu. Dalam hukum Perdata yang disebut anak adalah orang yang masih berada dalam pengawasan wali (*minderjarig ondervoodij*), sehingga tidak dianggap cakap hukum.

Istilah *adolescence* atau remaja berasal dari kata latin *adolescere*, yang berarti tumbuh menuju tahap dewasa. Remaja mencerminkan priode dimana individu mengalami pertumbuhan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Defenisi klasik memandang masa remaja sebagai masa pertumbuhan fisik yang ditandai oleh bertumbuhnya tinggi dan berat badan. Beberapa ahli memiliki pandangan yang berbeda tentang waktu masa remaja berlangsung. Hurlock (1999) membagi dua bagian masa remaja, yaitu masa awal dan masa akhir. Masa awal remaja berlangsung sekitar umur 13 tahun, 16 atau sampai 17 tahun. Masa akhir bermula sekitar 16, 17 sampai 18 tahun, yaitu usia dimana anak mengalami kematangan secara hukum. Sedangkan menurut Monks dkk (1999) menyatakan bahwa secara umum masa remaja berlangsung antara 12 sampai 21 tahun dengan membagi masa tersebut dengan tiga masa. Masa remaja awal berlangsung antara 12 sampai 15 tahun, masa remaja pertengahan antara 15 sampai 18 tahun, dan umur 18 sampai 21 tahun adalah masa remaja akhir.⁴

Menurut penulis, Mengenai batasan anak dibawah umur, dalam hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku dinegara Indonesia memberikan sudut pandang yang berbeda. Hukum Islam mendefenisikan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum dewasa (*baligh*), batasan anak tidak didasarkan pada batasan usia melainkan lebih kepada tanda-tanda lahiriah

⁴Ahmad Afiiif, *Mengapa Kami Nakal*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012). h. 33-34.

(badaniyah). Sedangkan dalam hukum positif memberikan batasan umur bagi anak secara jelas. Dalam hukum positif yang dikatakan sebagai anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah menikah. Dan dalam hukum perdata anak adalah orang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah.

Berdasarkan pengertian diatas, anak adalah setiap manusia sejak dalam kandungan hingga berusia 21 tahun dan belum pernah menikah. Undang-undang di Indonesia telah jelas menaruh perhatian yang besar terhadap anak-anak dengan lahirnya tiga undang-undang diatas. Hal ini dikarenakan anak merupakan tunas bangsa dan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa yang rentang terhadap perkembangan zaman dan perubahan lingkungan dimana hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi jiwa dan raga anak. Anak bukanlah dewasa mini namun ia merupakan individu yang memiliki pikiran tubuh dan kebutuhan yang unik yang mencakup kebutuhan biologis, psikologis, sosial, dan spritual yang berbeda dengan orang dewasa , kebutuhan biologis anak mencakup kebutuhan nutrisi, eliminasi, oksigenasi, mobilisasi perawatan kesehatan dasar dan pemukiman yang layak. Kebutuhan psikologis anak mencakup kasih sayang, cinta, perhatian rasa aman dan nyaman, memiliki otoritas dan kebebasan berekspresi.

Kebutuhan sosial anak mencakup kesempatan untuk untuk berkomunikasi, bermain dan menjalin kerjasama dan pertemanan dengan teman sebaya dan orang lain. Kebutuhan spritual anak mencakup kebutuhan akan pengajaran agama dan moral pada anak, jadi berdasarkan hal tersebut, maka anak dipandang sebagai manusia yang utuh karena memiliki kebutuhan yang unik dan tidak dapat dijadikan sebagai individu

yang tunggal melainkan dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dalam konteks keluarga.⁵

2. Tindak Pidana Anak

Kenakalan remaja/anak disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* (dalam bahasa Inggris) dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak, anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan/ mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain, sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, Delikueni diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Tim proyek *Juvenile Delinquency* fakultas hukum Universitas Padjajaran pada bulan Desember 1967 memberikan perumusan mengenai *Juvenile Delinquency*, yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta tafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. Menurut Romli Atmasasmita *Juvenile Delinquency* adalah: setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.⁶

Thornburg (1982) menyebutkan bahwa kenakalan remaja merupakan konflik normatif antara remaja dan lingkungan sosialnya. Konflik tersebut muncul sebagai akibat dari perilaku remaja yang menyimpang dari aturan masyarakat, menurutnya kenakalan dapat dilakukan secara kelompok atau sendiri, terencana atau tiba-tiba,

⁵ Arbianingsih, *Keperawatan Anak Konsep dan Prosedur Tindakan*, h. 7-8.

⁶ Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak (Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif, dan Hukum Islam)*, h. 56.

serta ditujukan untuk menentang individu atau institusi. Menurutnya kenakalan remaja dapat dilihat dari lima perspektif, *Pertama*, perspektif hukum,, kenakalan remaja muncul sebagai tindakan remaja melanggar hukum sehingga mengundang perhatian penegak hukum. *Kedua*, perspektif psikologi, kenakalan dapat muncul bila remaja mengalami masalah emosi yang dapat mendorong perilaku anti sosial. *Ketiga*, perspektif sosiologi, kenakalan muncul sebagai reaksi dan pengaruh lingkungan. *Keempat*, perspektif fungsional, kenakalan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. *Keelima*, perspektif teknik, remaja tidak dikatakan nakal kecuali bila telah diberikan sanksi oleh pengadilan.⁷

Dalam pasal 1 butir 1 dan 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak. Istilah Anak nakal digunakan untuk anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan Perundang-undangan maupun menurut aturan peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat, yang dimaksudkan dalam undang-undang ini sebagai berikut:

1. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak nakal adalah
 - a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
 - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁸

Kenakalan anak atau remaja tersebut saat ini meliputi perbuatan-perbuatan yang sangat meresahkan dilingkungan masyarakat, sekolah maupun keluarga. Sebagai contoh dari kenakalan ini antara lain mencoret-coret tembok, pencurian

⁷Ahmad Afiif, *Mengapa Kami Nakal*, 53-54.

⁸Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Perundangan tentang Anak*, h. 16.

dengan kekerasan, perkelahian antar pelajar, mengganggu wanita di jalan sehingga menimbulkan pemerkosaan atau pencabulan, sikap anak atau remaja yang memusuhi orang tuanya atau perbuatan-perbuatan lainnya yang tercela dan memperhatikan bangsa dan negara berupa menggunakan narkoba, pornografi, dan kejahatan lainnya. Karena itu semakin luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan anak nakal akan menjadi sangat lama pula proses berlangsungnya asosiasi diferensial tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal dan kriminal.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerkosaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap yang melakukannya, Marshall mengatakan *“a crime is any act or omission prohibited by law for the protection of the public, and punishable by the state in a judicial proceeding in its own name”*. Suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam definisi tersebut, unsur kesalahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana pada hakikatnya adalah ‘perbuatan’ saja.⁹ Perbuatan disini menurut penulis berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan akibatnya dan dengan demikian, tindak pidana merupakan perbuatan melakukan suatu kejahatan yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku.

⁹Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2011), h. 29.

Berdasarkan Al-Qur'an Al karim perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab diberi hukuman dengan hukuman yang tertentu sesuai dengan keadilan menurut petunjuk Allah.

Dasar dari pada siapa yang berbuat pidana, perbuatan kejahatan apa yang dapat dipidana dan bagaimana hukumannya. Pertama di dasarkan kepada keimanan kepada Allah dan wahyu Allah Al-Qur'an dan kedua di dasarkan kepada akal sehat manusia untuk mendapatkan kemaslahatan di dunia kebahagiaan di akhirat. Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu atauran hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pada kesempatan yang lain, dia juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰

Adapun Mashall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam konsep KHUP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.¹¹

¹⁰Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), h. 11.

¹¹Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1981), h. 13.

Adapun menurut Muljatno perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana mengemukakan pendapat Herman Kantorowles Tat und Schuld. Yang masing-masing mempunyai unsur-unsurnya sendiri, yang termasuk unsur Handlung yaitu mencocoki rumusan delik, melawan hukum (tidak ada alasan pembeda); sedangkan unsur-unsur Handelnde yang masuk pembuat yaitu kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf).¹²

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembedanya.

2. Tindak pidana pemerkosaan

Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku. Menurut kamus bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur yang melekat pada tindakan pemerkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum, maksudnya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.¹³

¹²Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana (azas hukum pidana dan beberapa pengupasan tentang delik-delik khusus)*, t.p, t.th, h. 35.

¹³Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, h. 40.

Menurut Arif Gosita, Perkosaan itu dirumuskan melalui beberapa bentuk perilaku sebagai berikut:

- a. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek) sedangkan ada juga seorang laki-laki diperkosa oleh wanita.
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c. Persetubuhan diluar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan itu dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan olehkarena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.¹⁴ Ketiga unsur yang dikemukakan arif Gosita menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai obyek dari suatu kekerasan seksual (perkosaan).

Adapun menurut Koesparmono Irsan perkosaan adalah perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh. Sedangkan Soetadyo Wegnjosubroto mengatakan perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan hukum yang berlaku adalah melanggar.¹⁵

¹⁴Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, h. 45.

¹⁵Muhammad Agus Setiawan, “Analisa Hukum Islam dan KUHP terhadap Putusan Perkara Tindak Pidana Perkosaan Anak Ideot (Studi Analisis Putusan No.054/B/1997/PN.JKT-BAR), *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah), h. 36.

Sedangkan mengenai macam-macam perkosaan, kriminologi Mulyan W. Kusuma menyebutkan berikut ini”

1) *Sadistic Rape*;

Perkosaan sadistis artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

2) *Anger rape*;

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan gairah dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

3) *Donation rape*;

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban, tujuannya adalah penaklukan seksual pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual

4) *Seductive rape*;

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggaman.

5) *Victim Precipitated rape*;

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

6) *Ekxploitation Rape*;

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial.¹⁶

Tindak pidana perkosaan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termaksud ke dalam kejahatan kesusilaan. Kejahatan perkosaan diatur dalam buku II KUHPidana yang dijabarkan dalam beberapa pasal. Kata perkosaan terdapat pada pasal 258 KUHP. Kejahatan ini menurut KUHP hanya dapat dilakukan oleh laki-laki sebagai pelakunya, dibentuknya kejahatan di bidang ini, ditunjuk untuk melindungi kepentingan hukum perempuan.¹⁷

Pasal-pasal yang merumuskan mengenai tindak pidana perkosaan adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 285 KUHP. Rumusan kebijakan legislasi tentang tindak pidana perkosaan yang diatur didalam pasal 285 KUHP secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya, bersetubuh dengan dia dihukum karena perkosaan dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.¹⁸

¹⁶Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, h. 46-47.

¹⁷Idhan, *Hukum Pelaku Zina dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (studi perbandingan)*, *Skripsi* (Makassar: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin, 2011), h. 19.

¹⁸Tim Redaksi Pustaka Yustita, *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHA, KUHD*, h. 557.

Perumusan tersebut menetapkan beberapa kriteria untuk dapat menyebut suatu perbuatan sebagai tindak pidana perkosaan yaitu:

- 1) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- 2) Memaksa perempuan (berarti tidak ada persetujuan dari si korban)
- 3) Korban adalah bukan istrinya
- 4) Paksaan tersebut adalah paksaan untuk bersetubuh

Dalam pasal 258; memaksa di sini bertujuan agar perempuan menjadi korban bersedia menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya yaitu bersedia disetubuhi. Tindak pidana pemerkosaan tidak semata-mata dilakukan untuk pemuasan nafsu seksual pelaku secara sepihak, tetapi juga bertujuan untuk menundukkan korban dan menghancurkan harkat dan martabatnya sebagai perempuan dengan cara melakukan kekerasan seksual.¹⁹

Dalam hubungannya dengan tindak pidana pemerkosaan yang diatur dalam pasal 285 tersebut, maka yang menjadi salasilah unsurnya adalah pemaksaan yang dilakukan dengan cara kekerasan untuk melakukan suatu perbuatan (perkosaan). Kekerasan di sini memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban ada *causal verband* antara kekerasan dengan ketidakberdayaan korban. Kekerasan pada pemerkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP digunakan sebagai cara dari memaksa bersetubuh.

Berdasarkan fungsinya, maka kekerasan dalam pengertian 285 KUHP dapatlah didefinisikan sebagai suatu cara yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar.

¹⁹Ledeng Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.53.

Kekuatan badan mana yang mengakibatkan bagi orang lain itu tidak berdaya secara fisik, dalam keadaan tidakberdaya itulah orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya (walaupun bertentangan dengan kehendaknya).²⁰

b. Paksaan tersebut pasal 286 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa yang bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya yang sedang di ketahui bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.²¹

Pasal ini berkaitan dengan pemerkosaan kepada perempuan bukan istrinya yang sedang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Beberapa permasalahan muncul berkaitan dengan pengertian pingsan atau tidak berdaya, apakah termasuk di dalam pengertiannya kondisi tidak waras atau kondisi berada di bawah kekuasaan (tidak berdaya).

C. Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana

Hakim adalah orang yang dianggap tahu, paham, mengerti serta pintar dalam masalah hukum, keputusan hakim terutama dalam kasus peradilan anak merupakan bagian yang sangat sensitif dan penting, pasalnya yang menjadi obyek hukum adalah anak-anak. Hakim juga diharapkan adil dalam memutuskan perkara, serta dapat dipertanggung jawabkan putusannya tersebut.

²⁰Idhan, Hukum Pelaku Zina dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, *Skripsi*, h. 23.

²¹Tim Redaksi Pustaka Yustita, *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHA, KUHD*, h. 557.

Putusan pengadilan adalah suatu ketetapan hukum yang diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum atau bisa juga tertutup untuk umum setelah melalui proses dan prosedural Hukum Acara Pidana, serta memiliki hukum yang tetap dan sah, oleh sebab itu putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus dapat dipertanggungjawabkan serta harus adil dan bijaksana dalam memutus perkara, mengingat putusan hakim bukan hanya putusan sementara atau seketika itu juga, melainkan berdampak bagi kehidupan pelaku/terdakwa maupun korban.²²

Ada juga yang mengartikan putusan (vonnis) sebagai vonnis tetap (definitief) (Kamus istilah Hukum Fockema Andrea). Mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Ada juga yang disebut interlucutoire yang diterjemahkan dengan keputusan antara keputusan sela dan Preparatoire yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta keputusan provisionele yang diterjemahkan dengan keputusan untuk sementara.²³

Putusan pengadilan atau putusan hakim tertera dalam pasal 1 butir 11 KUHAP yang berbunyi:

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁴

²²Khamroatul Fatimah, “Pemeriksaan oleh Anak terhadap Anak dalam Perspektif Fikih Jinayah (Studi Putusan PN Cirebon No.45/Pid.B/2011/PN.CN)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012),h. 70.

²³Ledeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (diKejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 129.

²⁴Tim Redaksi Pustaka Yustita, *Kitab Lengkap KUHP, KUHP, KUHP, KUHP, KUHD* (Yogyakarta: Pusataka Yustita, 2013), h. 644

Oleh sebab itu putusan yang dijatuhkan oleh seorang Majelis Hakim harus dapat dipertanggungjawabkan serta harus adil dan bijaksana, mengingat putusan hakim bukan hanya putusan seketika itu juga, melainkan berdampak bagi kehidupan pelaku maupun korban, sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. Al-Nisa'/4: 135 sebagai berikut:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّرًا أَوْ تَعْزِضًا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah akan lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarikkan balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.²⁵

Bila dicermati pada ayat di atas bahwa setiap manusia diperintahkan untuk dapat berlaku adil terhadap siapapun, khususnya bagi seorang hakim. Hakim hendaknya menjunjung nilai-nilai keadilan dalam menjatuhkan perkara harus mewujudkan kemaslahatan umat, tidak berpihak dan bersikap netral.

Putusan hakim ditentukan melalui musyawarah majelis hakim. Musyawarah majelis ini sedapat mungkin merupakan permufakatan yang bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka dapat ditempuh dua cara yaitu:

²⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 100.

1. Putusan diambil dengan suara terbanyak, dan;
2. Jika yang tersebut a tidak diperoleh, maka yang dipakai adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa.²⁶

Jadi bagaimana cara hakim untuk memutuskan suatu hukuman kepada si terdakwa? Mengenai hal ini, Mr. M. H. Tirtaadmidjaja mengutarakan sebagai berikut:

Sebagai hakim, ia harus berusaha untuk menetapkan suatu hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil. Untuk mencapai usaha ini, ia harus memperhatikan:

- a. Sifat pelanggaran pidana itu (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan);
- b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu;
- c. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberatkan dan meringankan);
- d. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat tulen atau seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum (*recidivist*) atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja; atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi;
- e. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana itu;
- f. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu (apakah ia menyesal tentang kesalahannya atautkah dengan kertas menyangkal meskipun telah ada bukti yang cukup akan kesalahannya);
- g. Kepentingan umum.²⁷

²⁶Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana* (Cet. I; Bandung: PT. Alumni, 2005), h. 111.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam mengambil suatu putusan. Faktor-faktor tersebut yaitu:

- 1) *Raw in-put*, yakni faktor-faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan informal dan sebagainya;
- 2) *Instrumental in-put*, faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal;
- 3) *Environtment in-put*, faktor lingkungan, sosial budaya yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan seorang hakim, misal lingkungan organisasi dan seterusnya.²⁸

Penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan diatas bahwa Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan sungguh-sungguh yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan, dan sebaiknya hakim sendiri haruslah mawas diri, karena sesungguhnya penegakan hukum hanya akan efektif, apabila kalangan penegak hukum terjaga kebersihannya. Kesejahteraan penegak hukum, termasuk hakim memang perlu diperhatikan, tetapi yang utama adalah peningkatan integritas moral penegak hukum tersebut.

Dalam memberikan putusan, hakim melihat beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara dengan setegas dan seadil-adilnya. Hal tersebut meliputi:

²⁷Ledeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (diKejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, h. 139.

²⁸Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, h. 116.

- a) Unsur-unsur tindak pidananya.
- b) Hal yang memberatkan dan meringankan.
- c) Mengadili.²⁹



²⁹Miftahu Chairina, “Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak di Bawah Umur dalam Pandangan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*, h. 52.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian: Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan. Kualitatif yaitu suatu jenis data yang mengategorikan data secara tertulis untuk mendapatkan data yang mendalam dan lebih bermakna.
2. Lokasi penelitian: Lokasi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu di Pengadilan Negeri Makassar karena menurut penulis dari sisi lokasi ini lebih terjangkau, artinya peneliti akan lebih cepat memperoleh data-data yang akurat.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian kualitatif lapangan untuk mendapat suatu data yang sesuai, peneliti menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan yuridis normatif.

Suatu metode penelitian yang menekankan pada suatu penelitian dengan melihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Metode ini senantiasa berpedoman pada peraturan-peraturan yang masih berlaku.

2. Pendekatan normatif Syar'i.

Pendekatan penelitian ini berdasarkan pada hukum islam dengan melihat apa yang ada dalam teks-teks al-Qur'an dan hadis serta pendapat-pendapat ulama.

3. Pendekatan komparatif

Pendekatan komparatif adalah suatu metode dengan cara membandingkan beberapa data atau pendapat yang satu dengan pendapat yang lain kemudian menarik sebuah kesimpulan dari hasil perbandingannya.¹ Seperti yang penulis dapatkan dari berbagai sumber untuk membandingkan dari data yang penulis dapatkan, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum nasional adalah kumpulan asas atau kaidah hukum tertulis yang terdiri dari prinsip-prinsip serta peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat pada suatu negara yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara. Salasatu dari negara atau yang menganut hukum ini yaitu negara Indonesia, sedangkan hukum islam yaitu peraturan hukum yang berlaku oleh penganut muslim saja dan ketetapanannya telah ada sejak manusia Lahir yaitu Hukum Allah swt.
- b. Hukum islam adalah ketetapan Allah swt., yang telah tertera dalam ayat-ayat AlQur'an dan hadits, baik ketetapan itu ditegaskan langsung secara pasti (*qath'iy*), maupun ketetapan yang tidak ditegaskan secara langsung. (*zanny*), guna terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kejahatan baik itu perintah maupun larangan yang harus kita patuhi.² Perbandingan hukum ini yaitu pembuat hukum, hukum positif dibuat oleh lembaga yang berwenang seperti DPR sedangkan hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an yang segala aturannya telah ditentukan oleh Allah swt. perbandingan yang sama dengan hukum nasional pada dasarnya hukum Islam adalah bagian dari hukum nasional tetapi

¹Idhan, Hukum Pelaku Zina dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (studi perbandingan), *Skripsi* (Makassar: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin, 2011), h. 15.

²Waspada Santing, *Profesi Jurnalistik Perspektif Hukum Islam* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 76.

berbandingannya hukum Islam memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan hukum nasional.

C. *Sumber Data*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder.

1. Data Primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan, dengan cara-cara seperti interview yaitu berarti kegiatan langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara dan tanya jawa pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang jelas. Dan sumber data tersebut dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/ audio tapes, atau pengambilan foto.
2. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan teknik untuk mencari bahan-bahan atau data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui library reseacrh, dengan jalan menelaah peraturan perundang-undangan terkait, jurnal ilmiah, tulisan atau makalah, dokumen atau arsip, dan bahan lain dalam bentuk tertulis yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.

D. *Metode Pengumpulan Data*

Didalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu:

- a. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang membicarakan jawaban atas pertanyaan itu.
- b. Observasi adalah metode atau cara-cara untuk mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa ada usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur, atau memanipulasinya.
- c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau data-data yang bersangkutan.

E. *Instrument Pengumpulan Data*

Instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” sejauh penelitian kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya turun di lapangan untuk meneliti. Adapun alat-alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.
2. Buku catatan dan alat tulis, Alat ini berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
3. Camera, alat ini berfungsi untuk memotret juga peneliti sedang melakukan pembicaraan atau mewawancari informan.
4. Tape recorder, alat ini berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan dengan informan.

F. *Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data*

1. Pengolahan data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Klasifikasi data adalah mengolongkan atau menkategorikan data yang dihasilkan dalam penelitian.
- b. Reduksi data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
- c. Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.
- d. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki data serta menghilangkan keragu-raguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.

2. Analisis data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah-millah, mengklasifikasikan, dan mencatat yang di hasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Pengadilan Negeri Kota Makassar yang terletak di jalan Kartini No. 18/23 kota Makassar provinsi Sulawesi Selatan. Letak Pengadilan Negeri sangat strategis tepatnya berada ditengah kota, sehingga memudahkan akses bagi masyarakat kota makassar untuk menjangkau Pengadilan tersebut. Letak Pengadilan Negeri Makassar juga tidak jauh dari perkotaan pemerintah lainnya, seperti Kantor Kejaksaan Negeri Makassar, Kantor Polrestabes Makassar, Kantor BI Cabang Makassar, Menara Bosowa, dan pusat perbelanjaan, seperti Karebosi link, Makassar Trade Center (MTC), dan pasar sentral Makassar.

Adapun batas-batas letak Pengadilan Negeri Makassar, yaitu diSebelah Utara berbatasan dengan monumen mandala, Sebelah Selatan berbatasan dengan lapangan karebosi, Sebelah Timur berbatasan dengan rumah sakit plamonia, Sebelah Barat berbatasan dengan Kejaksaan Negeri Makassar (Kejari) dan kantor Bank mandiri cabang Makassar.

Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Makassar memiliki gedung yang memadai untuk segala keperluan penyelenggaraan sidang perkara pidana dan perkara perdata. Ruang sidang perkara Pengadilan Negeri Makassar terdiri dari delapan ruang sidang. Selain itu, tersedianya keperluan kantor bagi tenaga struktural, seperti ruang ketua pengadilan negeri makassar dan wakilnya, ruang ketua panitera-panitera pengganti, ruang bendahara, dan ruang bagi pegawai pengadilan lainnya. Di samping itu, terdapat ruang tenaga teknis, seperti ruang para hakim yang bertugas rutin

memeriksa perkara. Selain itu, Pengadilan Negeri Makassar telah dibentuk di dalamnya pengadilan Niaga, pengadilan HAM, dan pengadilan Tipikor.

Adapun tugas dan wewenang Pengadilan Negeri Makassar sebagai pengadilan tingkat pertama yang memeriksa perkara pidana dan perkara perdata yang wilayah hukumnya Kota Makassar. Tugas pokoknya, yakni menerima, memeriksa, dan mengadili pelimpahan berkas penuntutan perkara dari Kejaksaan Negeri Makassar yang berkaitan dengan kejahatan dan pelanggaran hukum yang terjadi dalam wilayah hukumnya. Dalam bidang keperdataan, Pengadilan Negeri Makassar sangat berperan memeriksa dan menyelesaikan sengketa hak antara penggugat dan tergugat.

B. Tinjauan Hukum Positif terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan oleh Pelaku di Bawah Umur.

Diketahui bahwa penelitian ini mengenai pemerkosaan yang dilakukan oleh anak menurut konstruksi yuridis perundang-undangan di Indonesia telah tertera dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 285 dan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak yang termuat dalam Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.

Untuk mengkaji lebih jelas mengenai pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dalam pandangan hukum positif Indonesia yang melakukan akan dipidana selama 12(dua belas) tahun penjara, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh anak putusan No. 166/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks, menerangkan sebagai berikut:

Melanggar pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang pada pokoknya merumuskan dalam unsur-unsur yang terdapat didalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa, bahwa yang dimaksud dalam unsur “barang siapa”, dalam penegertian hukum adalah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan, yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa M.R Alias R adalah merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban perorangan yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab di depan hukum Indonesia, sehingga pada saat terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar oleh Jaksa Penuntut Umum karena di dakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur barang siapa yang dimaksud oleh aturan hukum adalah diri terdakwa yang berdasar pemeriksaan di persidangan adalah benar sebagai orang yang di dakwa telah melakukan pidana dalam perkara pemerkosaan.

2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya. Yaitu dimana seorang wanita mendapat ancaman serta kekerasan terhadap terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan fakta hukum bukti surat Visum Et Repertum dari RS. Mappaodang Makassar No: VER/104/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015, yang ditanda tangani oleh dr. Mauluddin, menerangkan bahwa korban yang bernama Hastuti dengan hasil sebagai berikut:

HASIL/FAKTA PEMERIKSAAN

Alat kelamin Wanita:

- Serambi kemaluan (Vestibulum Vaginae) : ditemukan luka lecet serta tampak kemerahan.
- Selaput darah (Hymen) : ditemukan luka robek pada arah jam 3, jam 6, jam 11 sampai dasar dan tidak berdarah.
- Liang senggama (Introitus Vaginae) : ditemukan luka lecet pada bagian bawah.¹

3. Unsur bersetubuh, bahwa yang dimaksud unsur bersetubuh ini adalah peraduan antara laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap melalui keterangan dari saksi ahli dan saksi korban sendiri, bahwa benar terdakwa M.R menyeret korban ke bawah jembatan dan memperkosa korban beramai-ramai dengan cara mendudukan korban kemudian memasukkan kelamin terdakwa tersebut kedalam kemaluan korban.²

Dalam hal perkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 285 KUHP telah tertera jelas unsur barang siapa, dengan ancaman atau kekerasan dan bersetubuh, dalam pasal tersebut bagi yang melakukan tindakan tersebut dan diketahui terbukti melakukan akan dipidana penjara paling lama dua belas tahun.

Adapun pandangan hukum positif yang mengkaji tentang anak salasatu yang diterapkan di Indonesia adalah Undang-undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang

¹“Pengadilan Negeri Makassar” (Berkas Perkara Anak), *An. M.uh. Reski Alias Reski*, no. P-29 (13 Juli 2015)

²“Pengadilan Negeri Makassar” (Berkas Perkara Anak), *An. M.uh. Reski Alias Reski*, no. P-29 (13 Juli 2015)

pengadilan anak yang pada pokoknya menerangkan Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah dan dalam perkara yang diputus oleh pengadilan negeri terhadap terdakwa M.R Alias R yang dapat dijatukan hukuman olehnya telah sesuai dalam pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yang pada pokoknya menerangkan dapat dipidana penjarakan bagi anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, yaitu paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum dari ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, maka mengenai kasus pemerkosaan oleh terdakwa M. R Alias R Hakim telah memberikan hukuman yang seadilnya kepada pelaku dengan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan oleh Pelaku di Bawah Umur

Kata pidana dalam Hukum Islam disamakan dengan jinayat (Jarimah), sedangkan kata jinayat berasal dari bahasa Arab yang akar katanya جنى- يجنى- جنى bermakna ناول لثمر من السجرته memetik/memperoleh buah dari pohonnya. Pengertian yang dimaksud adalah seseorang akan memetik dan memperoleh imbalan atau ganjaran dari hasil perbuatannya tersebut. Dalam syaria't Islam jinayat bermakna segala tindakan yang dilarang oleh syari'at untuk melakukannya dan setiap perbuatan

yang dilarang oleh syari'at harus dihindari. Oleh karenanya akan menimbulkan bahaya terhadap agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda.³

Kejahatan yang disebutkan di atas dapat berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan secara jelas yang telah ditentukan nashnya atas keharaman dan sanksi pelakunya, seperti dalam kasus pemerkosaan perkosaan dalam pandangan hukum Islam adalah terjadinya hubungan kelamin laki-laki dan perempuan tetapi dalam keadaan terpaksa dan itu terjadi diluar pernikahan yang belum sah secara agama maupun hukum yang ada dinegara Indonesia dan perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai jarimah zina. *Jarimah* yaitu larangan syara' yang diancam dengan hukuman *hadd* atau hukuman *Ta'zir*, larangan tersebut adakalanya berupa perbuatan yang dicegah atau meninggalkan yang disuruh. Penyebutan kata-kata *syara'* dimaksudkan agar larangan-larangan harus datang dari ketentuan-ketentuan (*nash-nash*) *syara'* dan berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai jarimah apabila diancam hukuman terhadapnya. Dalam konteks hukum pidana Islam pemerkosaan dapat dikatakan perbuatan zina namun dengan paksaan.⁴

Kata paksaan dalam bahasa arab dikenal dengan sebutan *al-ikrah* (paksaan) terkandung sikap tidak kesenangan dan ketidakrelaan pada diri orang yang dipaksa dalam melakukan perbuatan. *Ikrah* menurut bahasa adalah memaksa orang untuk

³Kurniati, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam suatu Analisis Komparatif antara HAM dalam Islam dengan HAM Konsep Barat*, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 79.

⁴Ina Wahyuni, *Jarimah Zina dan Pembuktiannya menurut Hukum Islam*, jtpianin-gdl-s1 pdf. (2006).

melakukan sesuatu perbuatan yang tidak disenanginya, sedangkan kata *al-kurhu* berarti sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dipaksa tanpa adanya rasa senang dan rela.⁵ Kata *Ikrah* dapat ditemukan pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an dengan arti paksaan, seperti Q.S: An-Nurr/24:33 berikut ini:

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

“..... dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.⁶

Dari definisi diatas memiliki unsur ketidakrelaan pada diri orang yang dipaksa tersebut. Maka dari itu definisi yang penulis lampirkan diatas, bahwa terdapat empat unsur yang menonjol yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan pemaksaan.
2. Orang yang dipaksa melakukan perbuatan yang dikehendaki pemerkosa.
3. Ancaman yang diberikan oleh sipemaksa kepada orang yang dipaksa.
4. Ucapan atau perbuatan yang dipaksakan dan dilarang oleh Syara'.

Dengan adanya keempat unsur paksaan tersebut, maka mengakibatkan orang lain dengan terpaksa menyerahkan kehormatannya tanpa mampu menegelak.jenis

⁵Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 17.

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 354.

paksaan semacam ini dalam bahasa Indonesia mempunyai istilah khusus yaitu perkosaan seksual atau paksaan untuk melakukan perbuatan zina.

Adapun sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan, dalam hukum Islam menjatuhkan suatu sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap wanita, diperlukannya minimal empat orang saksi laki-laki yang adil dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan orang yang melakukan perbuatan tersebut harus mengakui secara terang-terangan contohnya *Bayyinah* atau *Hujjah* adalah berupa petunjuk alat bukti. Alat-alat bukti yang paling pokok atau *hujjah syar'iyah* yang diperlukan dalam sebuah pembuktian adalah:

- a. Iqrar (pengakuan) yaitu hujjah bagi si pelaku memberi pengakuan sendiri.
- b. Syahadah (kesaksian) yaitu hujjah yang mengenai orang lain.
- c. Qarinah (qarinah yang diperlukan).⁷

Sanksi hukuman perkosaan hanya dapat dilimpahkan kepada pelaku pemerkosa saja. Berikut penjelasan bagi pelaku zina yaitu sebagai berikut:

- 1) Sanksi Rajam. Hukuman ini bagi pelaku yang memperkosa dalam bentuk lemparan batu sampai orang yang memperkosa tersebut mati, pelemparan batu dimaksudkan agar terpidana dapat merasakan kesakitan sedikit demi sedikit dan juga berlangsung penyiksaan lebih lama. Hukuman rajam ini hanya diberikan kepada orang yang *Muhsan* (telah menikah).⁸
- 2) Hukuman dera dan pengasingan. Hukuman ini dilakukan sampai 100 kali cambukan dan diasingkan selama satu tahun terhadap zina yang dilakukan

⁷Miftahu Chairina, "Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak di Bawah Umur dalam Pandangan Hukum Pidana Islam", *Skripsi*, h. 35-36.

⁸Muhammad Agus Setiawan, "Analisa Hukum Islam dan KUHP terhadap Putusan Perkara Tindak Pidana Perkosaan Anak Ideot (Studi Analisis Putusan No.054/B/1997/PN.JKT-BAR), *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah), h. 71.

oleh orang yang belum beristri (*Gahiru Muhsan*) dan terhadap korban perkosaan tidak diberikan sanksi karena dia mendapat paksaan beserta ancaman dari pelaku. sanksi hukuman ini sama sekali tidak mempunyai motif pembunuhan, namun dalam pembunuhan ini tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku yang dihukum sebelum mencapai bilangan 100 pelaku bisa saja mati terlebih dahulu. Hukum ini dijelaskan dalam Q.S An-Nurr/24:2 sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Pezina Perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya Dalam menjalankan hukum agama Allah, jika benar kamu beriman mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.⁹

Hukuman dera ini berlaku bagi bagi pemerkosa yang belum menikah atau beristri, si pelaku pemerkosa karena perbuatannya harus di dijatuhi hukuman 100 kali cambukan, sedangkan hukuman pengasinan adalah si pelaku pemerkosa dibuang kesuatu tempat atau kedalam hutan selama setahun lamanya, hukuman ini adalah hukuman tambahan dari hukuman dera terhadap pelaku yang belum menikah (*ghaira Muhsan*).

⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 350.

Adapun Menurut pendapat Prof. Dr. H. Ambo Asse mengenai anak yang melakukan pemerkosaan. Dalam hukum Islam ada bermacam jenis hukuman, jenis-jenis hukuman dalam Islam yaitu Qisas-diyat, hudud, dan ta'zir, jadi apabila anak yang melakukan suatu pelanggaran tentu harus diberi pula hukuman baginya dan hukuman yang pantas adalah hukuman ta'zir. Hukuman Ta'zir adalah kebijakan hukum hakim yang berlaku, jadi pelaku dibawah umur harus dipertimbangkan bukan dengan memberikan hukuman qisas ataupun hadd tetapi untuk memberikan efek jera kepada pelaku dengan melihat pertimbangan atau kebijakan hukum Hakim dimana Hukuman Ta'zir ini bisa ringan dan bisa berat.¹⁰

Dengan mempertimbangkan atau melihat pelaku apakah masih bisa dibina dan diajar untuk kearah yang lebih baik lagi maka menurutnya apabila anak yang melakukan tindak kejahatan pemerkosaan maka harus diberikan hukuman Ta'zir. Lalu mengapa hanya Hukuman Ta'zir saja, karena melihat dari tindakan yang dilakukan anak tersebut bukan tindakan hudud dan pula bukan qisas-diyat yang dilaksanakannya, tetapi apabila perbuatannya itu dibuat lagi maka hukuman yang pantas bagi pelaku sudah bisa dijatuhi hukuman hadd, begitupun dalam kebijakan hukum Islam dalam melihat pertimbangannya anak sebagai pelaku pemerkosaan maka hukuman yang dapat diberikan adalah hukuman Ta'zir, sedangkan untuk perbedaan hukuman yang dilakukan oleh orang dewasa jenis hukuman yang diberikan adalah hukuman cambuk sebanyak 100 kali (belum menikah) dan

¹⁰Ambo Asse (54 tahun), Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Alauddin Makassar, *Wawancara*, Makassar, 18 Februari 2016.

pengasingan selama satu tahun lamanya atau hukuman Hadd (hukum Allah) dan wajib membayar diyat atas kerugian yang dibuatnya.¹¹

Terhadap perlindungan korban kejahatan pemerkosaan dalam hukum Islam, menurutnya korban harus dilindungi atau ditahan di dalam rumah selama satu tahun dan tidak memperlihatkan diri atau dipindahkan ke daerah yang lain, agar rasa malu kepada orang berkurang dan dilupakan sehingga korban dapat melakukan aktivitas seperti biasanya.¹²

Menurut komentar penulis hukuman yang dapat diberikan kepada anak yang melakukan pemerkosaan, yaitu diberikan hukuman yang seadil-adilnya tetapi sebelumnya harus dilihat apakah anak yang melakukan perbuatan tersebut masih bisa di didik, jika anak tersebut masih bisa di didik dengan baik, maka anak bisa dikembalikan kepada orang tuanya, tetapi sebaliknya apabila anak tidak bisa diatur atau tidak mendengar lagi apa yang di nasehatkan kepadanya, maka hukuman yang pantas diberi harus di pidanakan sesuai pasal yang bersangkutan ke lembaga yang berwenang khusus yang menagani masalah tindakan anak nakal.

¹¹Ambo Asse (54 tahun), Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Alauddin Makassar, *Wawancara*, Makassar, 18 Februari 2016.

¹²Ambo Asse (54 tahun), Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Alauddin Makassar, *Wawancara*, Makassar, 18 Februari 2016.

D. *Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Pelaku di Bawah Umur Putusan No.166/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks*

Seorang hakim memiliki beban dan tanggung jawab yang sangat berat, karena ditangannya keadilan seseorang digantungkan, keputusan yang dijatuhkan harus dapat dipertanggung jawabkan baik di dunia juga di akhirat untuk itu seorang hakim memiliki dua prinsip: 1) Hindari perkara *Had* dalam perkara yang mengandung *Subhat*. 2) Seorang hakim lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menjatuhkan hukuman.

Salasatu perkara yang telah diputus oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Makassar, yaitu kasus tentang tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak, maka sebelum penulis kaji lebih dalam mengenai kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh anak, maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan kronologi kejadian, yaitu sebagai berikut:

1. Duduk Perkara

Bahwa terdakwa M.R Alias R pada hari senin tanggal 06 Juli 2015 sekitar jam 23.30 Wita di Jalan Urip Sumiharjo Makassar tepatnya di bawah jembatan Jalan Urip Sumihardjo samping Wisma Benhill, terdakwa M.R Alias R melakukan pemerkosaan secara beramai-ramai yang disertai dengan kekerasan terhadap korban saudari Hastuti.

Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi bersama-sama dengan terdakwa M.R Alias R dan saksi pelaku F serta Saksi pelaku R Alias Manguni berkumpul di depan sari laut Universitas 45. Bahwa di sana mereka bersama-sama menghirup

lem fox yang dibeli secara patungan. Bahwa setelah menghisap lem, saksi pelaku R Alias Manguni bersama terdakwa M.R Alias R dan saksi pelaku Fadli bersama-sama kejembatan pampang untuk mencari orang untuk dihadang.

Bahwa pada saat pelaku dijembatan melihat saksi korban pr. Hastuti dengan menggunakan sepeda motor melintas di samping Kanal Pampang menuju ke Jalan Urip Sumihardjo tepatnya di samping wisma Benhil, namun saat itu korban dihadang oleh 3(tiga) orang pelaku yaitu saksi pelaku R Alias M bersama terdakwa M.R Alias R dan saksi pelaku F. Pada saat dihadang saksi pelaku M berdiri di depan, terdakwa M. R Alias R dan saksi pelaku F di belakang motor korban. Saat berhenti saksi pelaku R Alias M meminta uang kepada korban dengan mengatakan “UANGTA DULU KA” dan saksi korban mengatakan “TUNGGU SAYA MINTAKANKO DI KOSTNYA TEMANKU”, kemudian saksi pelaku Rifal Als Manguni mengatakan “TIDAK USAH KEMANA-MANA DISINI SAJA” dan pada saat korban memutar motornya untuk berbalik arah, saksi pelaku F mengambil kunci dan mematikan motornya, setelah itu saksi korban mengambil Handphone dan menghubungi pacar saksi korban lk. Sultan, pada saat menelfon Handphone saksi korban diambil oleh R Alias M dan terdakwa M. R Alias R bersama-sama saksi pelaku R Alias M dan saksi pelaku F mengancam saksi korban “KALAU KAKAK TIDAK MAU KAMI BUANG KE KANAL”

Bahwa saksi pelaku F juga merampas 2 (dua) buah Handphone milik korban beserta uang Rp. 20.000(dua puluh ribu rupiah), saksi korban Hastuti yang ada dikantong sweater/jaket korban dan mengantonginya.

Bahwa setelah itu saksi Pelaku F membekap mulut saksi korban dan kemudian saksi pelaku F membuka baju dan langsung menutup kewajah saksi korban, setelah itu saksi korban tangannya ditarik oleh saksi pelaku F bersama saksi R Alias M, kemudian korban di bawah ke bawah jembatan, pada saat di bawah jembatan penutup muka dibuka oleh saksi pelaku F, kemudian saksi pelaku R Alias M mengatakan pada saksi korban “AYO GANRANG” dan dijawab oleh saksi korban “APA ITU GANRANG” dan dijawab lagi “AYOMI JANGANMOKO TAUKI” selanjutnya saksi pelaku R Alias M memegang tangan korban dan terdakwa M.R Alias R menutup mulut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian saksi pelaku F membuka celana dan celana dalam saksi korban sampai kebatas lututnya lalu korban disandarkan didinding tembok jembatan, dan terdakwa M.R Alias R memegan dari belakang saksi korban sambil mencium bibir saksi korban, sedangkan saksi pelaku F memegang payudara korban. Pada saat setengah telanjang, saksi pelaku R Alias M membuka juga celananya dan memasukkan Penis ke Vagina saksi korban dengan posisi berdiri setelah itu mencabut dan menumpahkan air spermanya diluar. Bahwa saksi pelaku R Als M juga memasukkan jari ke Vagina saksi korban.

Bahwa setelah itu saksi pelaku F memindahkan saksi korban ditembok fondasi dan mendudukan dan memperkosa saksi korban sambil digoyangkan.

Bahwa setelah itu terdakwa M.R Alias R juga melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban, dimana setelah saksi korban diperkosa oleh R Alias M, kemudian F selanjutnya terdakwa M.R Alias R menarik korban dan memindahkan pada pipa besi yang ada dikolong jembatan serta mendudukan saksi korban kemudian dari depan terdakwa M.R Alias R memasukkan penis ke Vagina saksi korban sebanyak 3 (kali) disaat itulah saksi korban merasakan kesakitan, setelah itu saksi pelaku R Alias M dan saksi pelaku F menyuruh saksi korban untuk menjilat kemaluan mereka dan pada saat itu ada seorang bapak yaitu saksi Mustari Alias Tari melihat dan meneriaki pelaku terdakwa, sehingga ketiganya lari secara terpisah dan kemudian saksi Mustari Alias Tari menolong saksi korban dan melaporkan peristiwa yang saksi korban alami ke Polsek Panakkukang.¹³

2. Dakwaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menimbang dengan No.Reg.Perkara: PDM-87/Mks/Ep/07/2015 disebutkan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu:

bahwa ia terdakwa MUH. RESKI Alias RESKI bersama-sama dengan saksi RIFAL dan saksi FADLI Bin RAHMAN (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Senin Tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 23.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, bertempat di Jl. Urip Sumihardjo

¹³“Pengadilan Negeri Makassar” (Berkas Perkara Anak), *An. Muh. Reski Alias Reski*, (13 Juli 2015), h. 4.

Makassar tepatnya di bawah jembatan samping Wisma Benhil, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN. Makassar, mereka melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya yaitu Pr. HASTUTI untuk bersetubuh dengannya.

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS. Mappaodang Makassar No: VER/104/VII/2015/ Forensik tanggal 10 Juli 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Mauluddin M, Sp.F yang menerangkan sebagai berikut

- Serambi kemaluan (vestibulum vagianae) ditemukan luka lecet serta tampak kemerahan;
- Selaput dara (hymen): ditemukan luka robek pada arah jam 3, jam 6 dan jam 11 sampai dasar dan tidak berdarah;
- Liang senggama (Introitus vagianae): ditemukan luka lecet pada bagian bawah;
- Tes kehamilan: Negatif

Kesimpulan:

- Ditemukan tanda-tanda penetrasi benda tumpul pada alat kelamin korban;
- Ditemukan selaput dara sudah tidak utuh (luka robek lama);
- Ditemukan tanda-tanda persentuhan tumpul baru (serambi kemaluan dan liang senggama lecet).

Maka perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

DAN,

Kedua:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa MUH. RESKI Alias RESKI bersama-sama dengan saksi RIFAL dan saksi FADLI Bin RAHMAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin Tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 23.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, bertempat di Jl. Urip Sumihardjo Makassar tepatnya di bawah jembatan samping Wisma Benhil, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN. Makassar, telah mengambil barang sesuatu berupa dua buah Handphone merk Nokia yang seluruhnya atau sebahagian milik saksi korban HASTUTI, yang dilakukan secara bersama-sama/ atau lebih dari satu orang, didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan melarikan diri atau kawannya turut melakukan kejahatan tersebut akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Maka perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU,

Kedua:

Bahwa ia terdakwa MUH. RESKI Alias RESKI bersama-sama dengan saksi RIFAL dan saksi FADLI Bin RAHMAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin Tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 23.30 Wita, atau

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, bertempat di Jl. Urip Sumihardjo Makassar tepatnya di bawah jembatan samping Wisma Benhil, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN. Makassar, dengan cara melawan hukum, telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) buah Handphone merk Nokia yang seluruhnya atau sebahagian milik saksi korban HASTUTI, yang dilakukan secara bersama-sama/ atau lebih dari satu orang.

Maka perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.¹⁴

Bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi korban dan saksi ahli yang memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI I: KORBAN HASTUTI

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 06 juli 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jl. Urip Sumihardjo tepatnya di bawah jembatan samping wisma benhil Makassar, saksi korban telah disetubuhi beramai-ramai oleh terdakwa bersama dua orang temanya.
- Bahwa benar sebelum saksi sedang mengendarai sepeda motor dan saat melintas dekat kanal, disamping wisma Benhil, pada saat ditikungan tersebut sepeda saksi motor korban dihadang oleh Rifal alias Manguni bersama M.R alias R dan Fadli. Pada saat dihadang terdakwa M.R alias R berdiri disamping, Rifal alias Manguni di depan dan Fadli di belakang motor. Saat berhenti saksi Rifal alias Manguni meminta uang kepada saksi korban, dan saksi korban mengatakan “tunggu saya mintakanko di kostnya temanku” Rifal alias Manguni mengatakan “tidak usah kemana-mana disini saja”. Pada saat motor mau diputar untuk berbalik arah, saksi Fadli mengambil kunci dan mematikan motornya. Setelah itu saksi korban mengambil Handphone dan menghubungi pacar saksi korban Lk. Sultan pada saat menelfon, handphone saksi korban diambil oleh Rifal alias Manguni, dan terdakwa bersama-sama saksi Rifal alias Manguni dan Fadli mengancam saksi korban “kalau kakak tidak mau ikut, kami akan buang ke kanal”.
- Bahwa benar setelah itu saksi Fadli membekap mulut saksi korban dan kemudian saksi Fadli membuka baju dan langsung menutup kewajah saksi korban setelah itu, saksi korban tangannya ditarik oleh saksi Fadli bersama saksi Rifal alias Manguni, kemudian korban di bawah ke bawah jembatan. Pada saat di bawah jembatan penutup muka dibuka oleh saksi Fadli, kemudian saksi Fadli membuka celana dan celana dalam saksi korban, terdakwa M.R alias R memegang dari belakang saksi korban sambil memegang payudara. Pada saat setengah telanjang, saksi Rifal alias Manguni membuka juga

¹⁴“Pengadilan Negeri Makassar” (Berkas Perkara Anak), *An. M.uh. Reski Alias Reski*, no. P-29 (13 Juli 2015)

celananya dan memasukkan penis ke Vagina saksi korban dengan posisi berdiri.

- Bahwa benar pada saat saksi korban disetubuhi, terdakwa M.R alias R dan saksi Fadli memegang payudara dan mencium bibir saksi korban secara bergiliran, setelah saksi Rifal alias Manguni menyetubuhi, kemudian saksi Fadli bergantian dengan Rifal Alias Manguni menyetubuhi saksi korban dengan posisi duduk, setelah Fadli kemudian Rifal alias Manguni kembali lagi menyetubuhi saksi korban dengan posisi duduk, kemudian bergiliran lagi Terdakwa M.R alias R dengan posisi duduk, kemudian dilanjutkan lagi oleh saksi Rifal alias Manguni, kemudian terdakwa dengan posisi berdiri, dan kemudian terakhir oleh Fadli.
- Bahwa benar saksi korban disuruh untuk menghisap Penis terdakwa dan saksi Fadli dan Rifal alias Manguni.
- Bahwa benar setelah saksi Fadli menyetubuhi saksi korban dan hendak memakai celananya, seseorang berteriak dan menyorot dengan menggunakan senter dari atas jembatan.
- Bahwa benar orang itu bernama Lk. Mustari, menolong saksi korban dan sempat memburuh terdakwa bersma saksi Fadli dan Rifal alias Manguni. Bahwa pada saat saksi Mustari kembali ke bawah jembatan dan mendekati saksi korban dan menyuruh untuk memakai celana, kemudian mengantarkan ke rumah pacar saksi korban Lk. Sultan di pampang.
- Bahwa benar saat di rumah Lk. Sultan, saksi korban menelfon kakak Pr. Hasdiana, dan menceritakan kejadian tersebut. Pada saat itu saksi korban bersama orang tua Lk. Sultan pergi melapor di kantor Polisi Polsek Panakukkang dan setelah itu saksi korban di bawah ke RS. Bhayangkara dan dilakukan visum.
- Bahwa benar, saksi korban membenarkan keterangan dan membenarkan barang bukti pakaian dan beserta dua buah handphone yang diperlihatkan di muka persidangan.
- Bahwa benar, saksi korban sangat keberatan dengan perbuatan terdakwa dan rekannya.¹⁵

SAKSI II: HASDIANA

- Bahwa benar, saksi adalah kakak kandung korban.
- Bahwa benar pada hari senin 6 Juli 2015, sekira pukul 23.30 Wita, saksi korban telah disetubuhi oleh Terdakwa bersama-sama dua orang rekannya.
- Bahwa benar, pada saat kejadian saksi berada dirumahnya Jeneponto.
- Bahwa benar saksi menyuruh saksi korban untuk segera melapor ke kantor Polisi terdekat untuk melaporkan kejadian tersebut supaya menangkap segera terdakwa bersama dua rekannya yang lain.
- Bahwa benar, saksi dan saksi korban tinggal bersama di rumah kost di daerah rappocini.
- Bahwa benar saksi selaku kakak kandung saksi korban sangat keberatan dengan perbuatan terdakwa dan rekannya.¹⁶

¹⁵“Pengadilan Negeri Makassar” (Berkas Perkara Anak), *An. M.uh. Reski Alias Reski*, (13 Juli 2015), h. 4.

SAKSI III: MUSTARI ALIAS TARI

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 6 Juli 2015 sekira pukul 23.30 wita, bertempat di Jl. Urip Sumihardjo tepatnya di bawah jembatan samping wisma Benhill, korban telah disetubuhi oleh Terdakwa bersama dua orang rekannya.
- Bahwa benar saksi adalah kerabat Om dari Terdakwa dan saksi Rifal alias Manguni.
- Bahwa benar pada malam kejadian, saksi diberitahu oleh adik Terdakwa kepada saksi dan berkata “Om adaki Manguni sama temannya di bawah jembatan”. Setelah mendapatkan informasi itu, saksi bersama istrinya pergi ke jembatan dan hanya menemukan saksi Fadli sambil memakai celana. Pada saat mendekati kolom jembatan tersebut, saksi Fadli langsung lari meninggalkan saksi korban.
- Bahwa benar setelah memburu saksi Fadli yang tidak didapat, saksi langsung mendekat kepada saksi korban, pada saat mendekat saksi korban bilang “jangki apa-apaika, lemasma Kodong” saksi langsung menyuruh saksi korban dan berkata “tenang meki, pakai meki celanata, saya tolongki ini, istriku di atas bentor” sambil menunjuk keatas.
- Bahwa benar saksi membawa saksi korban ke warung Sari Laut sambil memberikan air putih, dan setelah itu mengantarnya ke rumah Lk. Sultan yang ada di pampang.
- Bahwa benar setelah mengantar saksi korban ke pampang, saksi kemudian mencari terdakwa dan dua rekannya, sampai akhirnya saksi menemukan terdakwa M.R alias R dan membawa ke kantor polisi Polsek Panakukkang, sebelum saksi Rifal alias Manguni telah diamankan oleh warga pampang, dan terakhir saksi Fadli di bawah kekantor Polsek Panakukkang.¹⁷

SAKSI AHLI IV: FADLI BIN RAHMAN

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 6 Juli 2015 sekira pukul 23.30 wita, bertempat di Jl. Urip Sumihardjo tepatnya di bawah jembatan samping wisma benhil Makassar, korban telah disetubuhi bersama Terdakwa dan saksi Rifal Alias Manguni.
- Bahwa benar, sebelum kejadian tersebut, saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Rifal alias Manguni berkumpul di depan sari laut Universitas 45. Bahwa di sana mereka bersama-sama menghisap lem Fox yang dibeli oleh patungan. Bahwa setelah menghisap lem, saksi bersama Terdakwa bersama saksi Rifal alias Manguni bersama-sama ke jembatan Pampang untuk mencari orang untuk dihadang.
- Bahwa benar, pada saat saksi di Jembatan melihat saksi korban pr. Hastuti sedang mengendarai sepeda motor dan saat melintas dekat kanal, disamping Wisma Benhil, pada saat ditikungan tersebut, sepeda motor saksi korban, dihadang oleh saksi Rifal alias Manguni bersama terdakwa dan saksi Fadli. Pada saat dihadang, saksi Rifal alias Manguni berdiri di depan, terdakwa di

¹⁶Pengadilan Negeri Makassar” (Berkas Perkara Anak), *An. M.uh. Reski Alias Reski*, (13 Juli 2015), h. 5.

¹⁷“Pengadilan Negeri Makassar” (Berkas Perkara Anak), *An. M.uh. Reski Alias Reski*, (13 Juli 2015), h. 6.

samping dan Fadli di belakang motor. Saat berhenti saksi Manguni meminta uang kepada saksi korban, dan saksi korban mengatakan “tunggu saya mintakanko di kostnya temanku” Rifal alias Manguni mengatakan “tidak usah kemana-mana disini saja”. Pada saat motor mau diputar untuk berbalik arah, saksi Fadli mengambil kunci dan mematikan motornya. Setelah itu saksi korban mengambil Handphone dan menghubungi pacar saksi korban Lk. Sultan pada saat menelfon, handphone saksi korban diambil oleh Rifal alias Manguni, dan terdakwa bersama-sama saksi Rifal alias Manguni dan Fadli mengancam saksi korban “kalau kakak tidak mau ikut, kami akan buang ke kanal”.

- Bahwa benar saksi Fadli mengambil juga handphone dan uang Rp. 20.000-, saksi korban yang ada di kantong sweater/jaket korban dan mengantongi.
- Bahwa benar setelah itu saksi Fadli membekap mulut saksi korban, kemudian saksi Fadli membuka baju dan langsung menutup kewajah saksi korban setelah itu, saksi korban tangannya ditarik oleh saksi Fadli bersama saksi Rifal alias Manguni, kemudian korban di bawah ke bawah jembatan. Pada saat di bawah jembatan penutup muka dibuka oleh saksi Fadli, kemudian saksi Fadli membuka celana dan celana dalam saksi korban, terdakwa memegang dari belakang saksi korban sambil memegang payudara. Pada saat setengah telanjang, saksi Rifal alias Manguni membuka juga celananya dan memasukkan penis ke Vagina saksi korban dengan posisi berdiri.
- Bahwa benar saksi Rifal alias manguni memasukkan juga jari ke vagina saksi korban.
- Bahwa benar pada saat saksi korban disetubuhi, saksi Fadli dan terdakwa memegang payaudara dan mencium bibir saksi korban secara bergiliran, setelah saksi Rifal alias Manguni menyetubuhi, kemudian saksi Fadli bergantian dengan saksi Rifal alias Manguni menyetubuhi saksi korban dengan posisi duduk, setelah Fadli kemudian saksi Rifal alias Manguni kembali lagi menyetubuhi saksi korban dengan posisi duduk, kemudian bergiliran lagi oleh Terdakwa dengan posisi duduk, kemudian dilanjutkan lagi oleh saksi Rifal alias Manguni, kemudian terdakwa dengan posisi berdiri, dan kemudian terakhir oleh Fadli.
- Bahwa benar ketika mendengar orang berteriak dan menyenter saksi yang sedang memakai celana, dan ketika mendekat, saksi langsung lari meninggalkan saksi korban dan saksi Mustari yang mengejar.
- Bahwa benar pada keesokan harinya saksi diamankan oleh Mustari dan di bawah ke Polsek Panakukkang.
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.¹⁸

SAKSI AHLI: V RIFAL ALIAS MANGUNI

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 6 Juli 2015 sekira pukul 23.30 wita, bertempat di Jl. Urip Sumihardjo tepatnya di bawah jembatan samping wisma benhil Makassar, saksi korban telah disetubuhi secara beramai-ramai oleh saksi bersama Terdakwa dan saksi Fadli serta saksi Rifal alias Manguni.

¹⁸“Pengadilan Negeri Makassar” (Berkas Perkara Anak), *An. M.uh. Reski Alias Reski*, (13 Juli 2015), h. 7.

- Bahwa benar, sebelum kejadian tersebut, saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Fadli berkumpul di depan sari laut Universitas 45. Bahwa di sana mereka bersama-sama menghisap lem Fox yang dibeli oleh patungan. Bahwa setelah menghisap lem, saksi bersama Terdakwa bersama saksi Fadli bersama-sama kejembatan Pampang untuk mencari orang untuk dihadang.
- Bahwa benar, pada saat saksi di Jembatan melihat saksi korban pr. Hastuti sedang mengendarai sepeda motor dan saat melintas dekat kanal, disamping Wisma Benhil, pada saat ditikungan tersebut, sepeda motor saksi korban dihadang oleh saksi Rifal alias Manguni bersama terdakwa dan saksi Fadli. Pada saat dihadang, saksi Rifal alias Manguni berdiri di depan, terdakwa di samping dan Fadli di belakang motor. Saat berhenti saksi Manguni meminta uang kepada saksi korban, dan saksi korban mengatakan “tunggu saya mintakanko di kostnya temanku” Rifal alias Manguni mengatakan “tidak usah kemana-mana disini saja”. Pada saat motor mau diputar untuk berbalik arah, saksi Fadli mengambil kunci dan mematikan motornya. Setelah itu saksi korban mengambil Handphone dan menghubungi pacar saksi korban Lk. Sultan pada saat menelfon, handphone saksi korban diambil oleh Rifal alias Manguni, dan terdakwa bersama-sama saksi Rifal alias Manguni dan Fadli mengancam saksi korban “kalau kakak tidak mau ikut, kami akan buang ke kanal”.
- Bahwa benar saksi Fadli mengambil juga handphone dan uang Rp. 20.000-, saksi korban yang ada di kantong sweater/jaket korban dan mengantongi.
- Bahwa benar, setelah itu saksi fadli membekap mulut saksi korban, kemudian saksi Fadli membuka baju dan langsung menutup kewajah saksi korban setelah itu, saksi korban tangannya ditarik oleh saksi Fadli bersama saksi Rifal alias Manguni, kemudian korban di bawah ke bawah jembatan. Pada saat di bawah jembatan penutup muka dibuka oleh saksi Fadli, kemudian saksi Fadli membuka celana dan celana dalam saksi korban, terdakwa memegang dari belakang saksi korban sambil memegang payudara. Pada saat setengah telanjang, saksi Rifal alias Manguni membuka juga celananya dan memasukkan penis ke Vagina saksi korban dengan posisi berdiri.
- Bahwa benar saksi Rifal alias manguni memasukkan juga jari ke vagina saksi korban.
- Bahwa benar pada saat saksi korban disetubuhi, saksi Fadli dan terdakwa memegang payaudara dan mencium bibir saksi korban secara bergiliran, setelah saksi Rifal alias Manguni menyetubuhi, kemudian saksi Fadli bergantian dengan saksi Rifal alias Manguni menyetubuhi saksi korban dengan posisi duduk, setelah Fadli kemudian saksi Rifal alias Manguni kembali lagi menyetubuhi saksi korban dengan posisi duduk, kemudian bergiliran lagi oleh Terdakwa dengan posisi duduk, kemudian dilanjutkan lagi oleh saksi Rifal alias Manguni, kemudian terdakwa dengan posisi berdiri, dan kemudian terakhir oleh Fadli.
- Bahwa benar, ketika mendengar orang, saksi Rifal alias Manguni pergi lari bersama Terdakwa meninggalkan saksi Fadli.
- Bahwa benar pada keesokan harinya saksi Rifal alias Manguni diamankan oleh warga Pampang dan di bawah ke Polsek Panakkukang.

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.¹⁹

TERDAKWA: M. R ALIAS R

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekira pukul 23.30 wita, bertempat di Jl. Urip Sumihardjo tepatnya di bawah jembatan samping wisma benhill Makassar, saksi korban telah telah disetubuhi secara beramai-ramai oleh saksi bersama Terdakwa M.R Alias R dan saksi Fadli serta saksi Rifal Alias Manguni.
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut, saksi bersama-sama dengan terdakwa M.R alias R dan saksi Fadli serta saksi Rifal Alias manguni berkumpul di depan sari laut Universitas 45. Bahwa disana mereka bersama-sama menghisap lem Fox yang dibeli oleh patungan. Bahwa setelah menghisap Lem, saksi Rifal Alias Manguni bersama Terdakwa M.R Alias R dan saksi Fadli bersama-sama ke jembatan Pampang untuk mencari orang untuk dihadang.
- Bahwa benar pada saat saksi di jembatan melihat saksi korban pr. Hastuti sedang mengendarai sepeda motor dan saat melintas dekat Kanal, di samping Wisma Benhil, pada saat di tikungan tersebut, sepeda motor saksi korban, dihadang oleh saksi Rifal Alias manguni bersama Terdakwa M.R Alias R dan saksi Fadli. Pada saat dihadang, saksi Manguni berdiri di depan, terdakwa M.R Alias R di sampin dan Fadli dibelakang motor. Saat berhenti saksi Rifal Alias Manguni meminta uang kepada korban, dan saksi korban mengatakan “tunggu, saya mintakan uang di kost teman saya” kemudian saksi Rifal Alias Manguni mengatakan “tidak usah kemana-mana di sini saja”. Pada saat motor mau diputar untuk berbalik arah, saksi Fadli mengambil kunci dan mematikan motornya, setelah itu saksi korban Hastuti mengambil Handphone dan menghubungi pacar saksi Korban Hastuti lk. Sultan, pada saat sementara menelfon, Handphone saksi diambil oleh Rifal Alias manguni dan terdakwa M.R Alias R bersama-sama saksi Rifal Alias Manguni dan Fadli mengancam saksi korban pr. Hastuti kalau tidak ingin ikut bersama mereka maka diancam akan di buang ke kanal.
- Bahwa benar saksi Fadli mengambil juga handphone dan uang Rp. 20.000 saksi korban yang ada dalam jaket korban pr. Hastuti dan mengantongi.
- Bahwa benar, setelah itu saksi Fadli membekap mulut saksi korban pr. Hastuti dan kemudian saksi Fadli membuka baju dan langsung menutup wajah saksi korban Hastuti, setelah itu saksi korban Hastuti tangannya ditarik oleh saksi Fadli bersama saksi Rifal Alias manguni, kemudian korban di bawah ke bawah Jembatan. Pada saat di bawah jembatan penutup muka dibuka oleh saksi Fadli, kemudian saksi Fadli membuka celana saksi korban dan terdakwa M.R Alias R memegang dari belakang saksi korban sambil memegang payudara. Pada saat setengah telanjang, saksi Rifal Alias Manguni membuka juga celananya dan memasukkan alat kelaminnya di kemaluan saksi korban Hastuti dengan posisi berdiri.

¹⁹“Pengadilan Negeri Makassar” (Berkas Perkara Anak), *An. M.uh. Reski Alias Reski*, (13 Juli 2015), h. 8.

- Bahwa benar saksi Rifal Alias Manguni memasukkan juga jari ke vagina saksi korban.
- Bahwa benar, pada saat saksi korban disetubuhi, saksi Fadli dan Terdakwa memegang payudara dan mencium bibir saksi korban secara bergiliran, setelah saksi Rifal Alias Manguni menyetubuhi, kemudian saksi Fadli bergantian dengan saksi Rifal Alias manguni menyetubuhi saksi korban dengan posisi duduk, setelah Fadli kemudian saksi Rifal Alias manguni kembali lagi menyetubuhi saksi korban dengan posisi duduk, kemudian bergiliran lagi oleh terdakwa M.R Alias R dengan posisi duduk, kemudian dilanjutkan lagi oleh saksi Rifal Alias manguni, kemudian terdakwa dengan posisi berdiri dan kemudian terakhir oleh Fadli.
- Bahwa benar ketika mendengar orang, terdakwa langsung pergi lari bersama saksi Rifal Alias Manguni meninggalkan saksi Fadli.
- Bahwa benar pada keesokan harinya terdakwa diamankan oleh Mustari dan di bawah ke Polsek Panakukkang.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangannya dalam BAP dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.²⁰

3. Pertimbangan Pengadilan

Menimbang, berdasarkan keterangan beberapa orang yang telah didengar dalam persidangan antara lain keterangan saksi korban Hastuti, Mustari, Fadli, Rifal Alias manguni serta keterangan terdakwa sendiri M.R Alias R dan alat bukti Visum et Repertum dari RS. Mappaodang Makassar No: VER/104/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015, yang diajukan dalam persidangan yang saling berkaitan dengan yang lainnya telah memberikan petunjuk akan adanya perbuatan tersangka yang melakukan perbuatan pidana persetubuhan/pemeriksaan terhadap saksi korban dengan identitas dan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

IDENTITAS

Nama : Hastuti
 Jenis Kelamin : Perempuan.
 Umur : 21 Tahun.

²⁰“Pengadilan Negeri Makassar” (Berkas Perkara Anak), *An. M.uh. Reski Alias Reski*, (13 Juli 2015), h. 12.

Alamat : Jl. Rappocini raya Lr. 11/A No. 24 Makassar
 Waktu dan tempat pemeriksaan : Instalasi Kedokteran Forensik, pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015, 04.40 WITA.

HASIL/FAKTA PEMERIKSAAN

Alat kelamin Wanita:

- Serambi kemaluan (Vestibulum Vaginae) : ditemukan luka lecet serta tampak kemerahan.
- Selaput darah (Hymen) : ditemukan luka robek pada arah jam 3, jam 6, jam 11 sampai dasar dan tidak berdarah.
- Liang senggama (Introitus Vaginae) : ditemukan luka lecet pada bagian bawah.

Perlukaan yang ditemukan pada bagian tubuh lainnya: tidak ada

Pemeriksaan penunjang :

- Tes kehamilan : negatif
- USG : tidak dilakukan

KESIMPULAN/ INTERPRETASI PEMERIKSA

- Telah diperiksa satu korban hidup berjenis kelamin perempuan dan berusia dewasa
- Ditemukan tanda-tanda penetrasi benda tumpul pada alat kelamin korban.
- Ditemukan selaput darah sudah tidak utuh (luka robek lama)
- Ditemukan tanda-tanda persentuhan tumpul baru (serambi kemaluan dan liang senggama lecet).

Menimbang, bahwa atas keterangan kelima saksi yang telah disebutkan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum dan keterangan terdakwa sendiri bersama dengan rekannya beramai-ramai melakukan pemerkosaan/persetubuhan terhadap korban secara bergantian dan juga telah mengambil 2 buah Handphone milik korban:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru kotak-kotak hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu putih;
- 1 (satu) lembar sweater warna ungu;
- 1 (satu) lembar BH warna cream;
- 1 (satu) buah HP merk Gunaco; dan
- 1 (satu) buah Hanphone merk Nokia yang telah dikembalikan kepada korban.²¹

²¹“Pengadilan Negeri Makassar” (Berkas Perkara Anak), An. M.uh. Reski Alias Reski, (13 Juli 2015).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Penasehat Hukum terdakwa M.R Alias R mengajukan pembelaan (Pledoi) yang dibacakan pada tanggal 5 Agustus 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman berdasarkan kepentingan terbaik terdakwa yaitu sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang masih usia anak, yang punya masa depan dan masih bisa dibina.
- Bahwa pada saat persidangan terdakwa berkelakuan baik dan sopan.
- Bahwa terdakwa M.R alias R belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa terdakwa M.R alias R sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi .
- Bahwa terdakwa jujur dalam persidangan sehingga membantu jalannya persidangan dengan baik.

Menimbang hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu:

- (1)Perbuatan terdakwa saksi korban menjadi trauma.
- (2)Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik saksi korban sebagai seorang mahasisiwi dan seorang perempuan.
- (3)Perbuatan terdakwa tidak berperikemanusiaan

Hal-hal yang meringankan terdakwa adalah yaitu:

- (1)Terdakwa sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
- (2)Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut.
- (3)Terdakwa belum pernah dihukum.²²

4. Amar Putusan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan di Pengadilan Negeri Makassar tentang kasus perkara anak yang melakukan pemerkosaan,

²²“Pengadilan Negeri Makassar” (Berkas Perkara Anak), *An. M.uh. Reski Alias Reski*, (13 Juli 2015)

sebagaimana yang telah diputus di Pengadilan Negeri Makassar , Hakim telah merumuskan berbagai pertimbangan-pertimbangan berdasarkan bukti, saksi ahli, alat bukti Visum et Repertum Nomor: 104/VII/2015 dan apa yang telah disaksikan korban dalam persidangan. Hakim juga telah mempelajari berkas perkara dengan teliti, cermat dan seksama, mendengarkan gugatan dari Jaksa Penuntut Umum dan Jawaban serta pernyataan dari tergugat M.R Alias R yang didampingi oleh kuasa hukum terdakwa, maka dalam persidangan Mejlis Hakim membacakan Putusan terkait Perkara tindak pidana pemerkosaan yang di lakukan oleh pelaku di bawah umur, yaitu sebagai berikut:

AMAR PUTUSAN

Nomor 166/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MUH. RESKI Alias RESKI;
 Tempat lahir : Makassar;
 Umur/tanggal lahir : 15 tahun / 6 Juni 2000;
 Jennis kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat tinggal : Jalan Pampang II Lr. 5 Kota Makassar;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditahan oleh penyidik Polri: sejak tanggal 08 Juli 2015 s/d 14 Juli 2015.-
2. Diperpanjang oleh Kajari Makassar: Mulai tanggal 15 Juli 2015 s/d tanggal 22 Juli 2015.-
3. Jaksa Penuntut Umum: Mulai tanggal 23 Juli 2015 s/d tanggal 27 Juli 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar: tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan sekarang.²³

²³“Pengadilan Negeri Makassar” (Berkas Perkara Anak), *An. Muh .Reski Alias Reski*, (13 Juli 2015)

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum ROSMIATI SAIN, SH dkk, berdasarkan penetapan No.166/Pen/Pid.B/2015/PN.MKS., tanggal 5 Agustus 2015;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis No.166/Pen/Pid.B/2015/PN.Mks tanggal 11 Agustus 2015;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum Nomor Reg.Perkara: PDM-87/Mks/Ep/07/2015, tanggal 23 Juli 2015;

Memperhatikan Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perUndang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini maka Majelis Hakim memutus sebagai berikut;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUH. RESKI ALIAS RESKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pemerkosaan serta pencurian yang didahului/disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru kotak-kotak hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu putih;
 - 1 (satu) lembar sweater warna ungu;
 - 1 (satu) lembar BH warna cream;
 - 1 (satu) buah HP merk Gunaco;
 Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia dikembalikan kepada saksi HASTUTI;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2015 oleh SUPARMAN NYOMPA, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar,

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh RAHMAD, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dihadiri oleh ANDI ARMASARI, S.H. Jaksa Penuntut Umum, Penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa serta Orang Tua Terdakwa tanpa hadirnya Balai Perasyarakatan Kelas I Makassar.²⁴

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, di Pengadilan Negeri Makassar, oleh Majelis Hakim Mengatakan dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menimbang dalam tuntutan tersebut, JPU memberikan tuntutan kepada terdakwa M.R Alias R dengan tuntutan selama 8 (delapan) tahun penjara dan diputus oleh Majelis Hakim yang Khusus menangani perkara anak dengan melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, maka majelis hakim menjatuhkan hukuman Pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara serta biaya perkara sebesar Rp. 2000,- Selain dari pertimbangan di atas, Hakim juga melihat kondisi atau keadaan, fisik, psikis dan mental terdakwa yang terbilang masih anak-anak, meskipun dalam hukum Islam terdakwa sudah termasuk baligh dan cakap hukum, namun secara psikis, mental dan keadaan belum dapat dikategorikan masa berfikir penuh atau memiliki kemampuan akal yang sempurna. Hal yang terpenting dalam pertimbangan hakim yaitu terdakwa masih tergolong anak-anak.²⁵

Adapun penulis melakukan wawancara kepada Hakim untuk melihat apa yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pemerkosaan tersebut, yaitu

²⁴“Pengadilan Negeri Makassar” (Berkas Perkara Anak), *An. M.uh. Reski Alias Reski*, (13 Juli 2015)

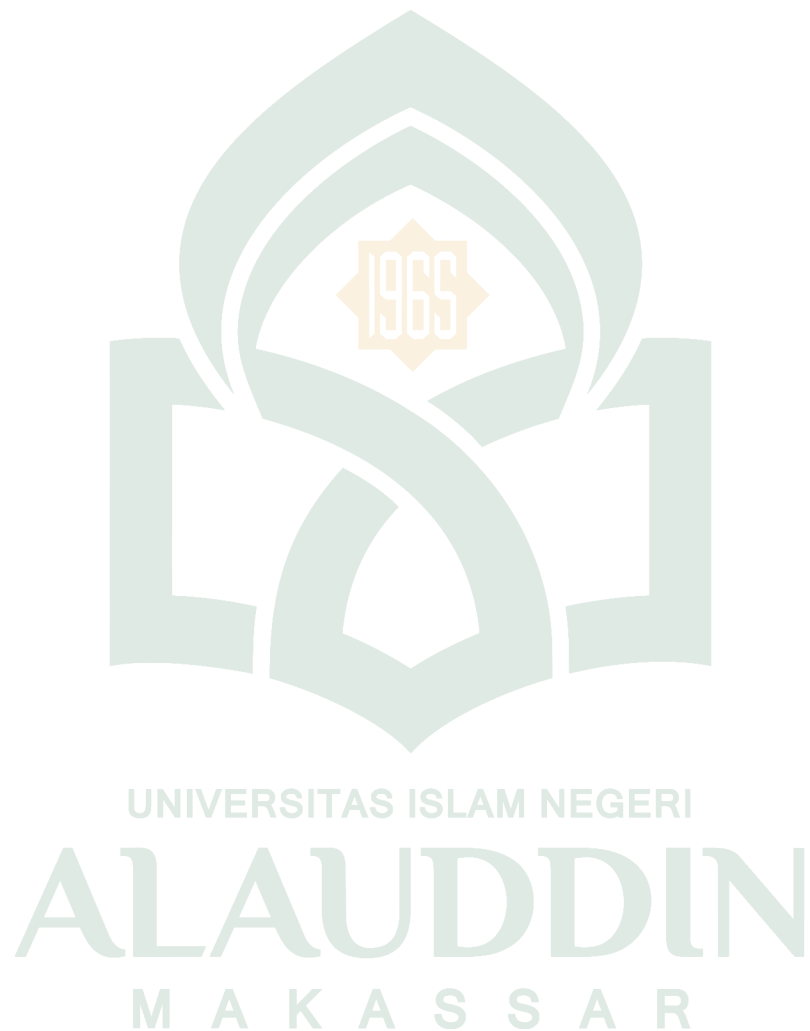
²⁵Suparman Nyompa (52 tahun), Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, Kamis 28 Januari 2016.

Menurutnya bahwa penyebab anak melakukan tindak pidana pemerkosaan salasatunya adalah faktor lingkungan, dimana faktor ini sangat mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku kerana lingkungan ini paling dekat dengan diri anak, dimana anak akan mencontoh tingkah laku perbuatan yang nantinya menjadi patokan dalam pergaulannya sehingga apabila anak tidak terurus oleh keluarganya maka anak bebas dalam melakukan apapun termasuk pergaulan bebas dan faktor selanjutnya yaitu pengaruh dari film porno yang sekarang ini banyak beredar di sosial media yang sangat mudah diakses oleh siapa saja termasuk anak, kemajuan teknologi dan kurangnya pengawasan dari orang tua menjadi pemicu anak bisa dengan mudah mengakses dan menonton film tersebut, tidak hanya itu, seringnya anak menonton film porno juga bisa membuat kepercayaan dirinya menurun drastis, jadi seolah-olah anak ini merasa yang ada dipikirannya itu hal-hal negatif, sehingga anak sulit berinteraksi dengan teman-temannya.²⁶

Dari hasil wawancara Hakim, penulis juga menambahkan pertanyaan mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan, yaitu adanya perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman seagaimana yang tertera dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang wajib dilaksanakan

²⁶Suparman Nyompa (52 tahun), Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 28 Januari 2016.

oleh Lembaga yang berkaitan menangani masalah tersebut (LPSK) atau lembaga lainnya yang khusus menangani masalah Undang-undang ini.²⁷



²⁷Suparman Nyompa (52 tahun), Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 28 Januari 2016.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menyimpulkan:

1. Tinjauan Hukum positif Indonesia mengenai tindak pidana pemerkosaan dan anak nakal tertera dalam KUHP pasal 285 dan merumuskan unsur pasal tersebut dengan unsur barang siapa, unsur dengan kekerasan atau ancaman serta unsur bersetubuh dan adapun yang tercantum dalam Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, dimana anak melakukan suatu tindakan kriminal.
2. Dalam tinjauan hukum Islam sanksi hukuman pemerkosaan yang dijatuhkan kepada pelaku yaitu sanksi rajam, hukuman dera dan pengasingan sebagaimana hukum ini telah tercantum dalam Q.S An-Nurr/24:2 tetapi dalam melihat kasus perkara yang dilakukan oleh anak maka hukuman yang diberikan adalah Ta'zir yaitu kebijakan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim.
3. Pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan di antaranya pertimbangan Yuridis dalam pasal 285 serta pasal 365, 363 KUHP, dimana hakim mendengarkan keterangan saksi korban dan saksi ahli, keterangan terdakwa, unsur-unsur tindak pidananya, tujuan pemidanaan serta hal yang memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan maka Majelis hakim

menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa 7 (tujuh) tahun penjara di tahanan Lapas Kelas I Makassar.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis uraikan, adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Para penegak hukum diharapkan mampu memberikan keadilan dengan seadil-adilnya tanpa ada yang merasa dizholimi atau terjadinya ketimpangan hukum terhadap korban, keluarga korban maupun pelaku, seperti halnya pemerkosaan yang banyak terjadi pada masyarakat kita, bukan hanya orang dewasa yang melakukan perbuatan keji tetapi anak pun jadi pelaku perkosaan. Jadi sudah seharusnya pemerintah memberikan penegakan hukum bagi pelaku kejahatan pemerkosaan karena perbuatan ini tidak hanya meresahkan orang sebagai korban saja tetapi ikut mencoreng nama baik keluarga korban juga masyarakat disekitarnya.
2. Masyarakat Indonesia mayoritas pada umumnya beragama Islam, maka membutuhkan Pengadilan pidana yang dimana menangani dan memutuskan suatu perkara secara adil dengan berlandaskan pada syari'at yang telah ditetapkan hukumnya oleh Allah swt., dan Rasul-NYA.
3. Untuk masyarakat khususnya orang tua agar lebih memperhatikan anak dalam pergaulan dilingkungannya agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang membahayakan dan meresahkan masyarakat disekitar, maka dari itu pentingnya anak di didik sejak dini agar anak tidak terjerumus ketindakan yang salah yang membuat anak bisa dipenjarakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Farid, Andi Zainal. *Hukum Pidana (azas hukum pidana dan beberapa pengupasan tentang delik-delik khusus)*.
- Afiif, Ahmad, *Mengapa Kami Nakal*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Agus Setiawan, Muhammad. *Analisa Hukum Islam dan KUHP terhadap Putusan Perkara Tindak Pidana Perkosaan Anak Ideot (Studi Analisis Putusan No.054/B/1997/PN.JKT-BAR), Skripsi*. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Arbiahningsih. *Keperawatan Anak konsep dan Prosedur Tindakan*. Makassar: Alauddin Press, 2011.
- Chairina, Miftahu. *Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak di Bawah Umur dalam Pandangan Hukum Pidana Islam, Skripsi*. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Djubaedah, Neng. *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Agama (Islam)*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2010.
- Djubaedah, Neng. *Perzinaan dalam Peraturan Perundangan-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Fatimah, khamroatul. *Pemerkosaan oleh Anak terhadap Anak dalam Perspektif Fikih Jinayah (Studi Putusan PN Cirebon No.45/Pid.B/2011/PN.CN. Skripsi*. Yokyakarta: Fak. Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Hasan, Hamzah. *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Idhan, *Hukum Pelaku Zina dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Perbandingan, Skripsi*. Makassar: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin, 2011.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Alfatih, 2013.
- Kurniati, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam suatu Analisis Komparatif antara HAM dalam Islam dengan HAM Konsep Barat*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Luqmansari, Iin. *Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Studi Putusan Pengadilan Negeri Yokyakarta (No.14/Pid B/2008), Skripsi*. Yokyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.

- Luhulima, Achie Sudiarti. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: PT. Alumni, 2000.
- Marpaung, Ledeng. *Proses Penanganan Perkara Pidana (diKejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- M. Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Moerad, Pontang. *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 2005.
- Peran Anggota dalam Penghapusan Kemiskinan Perempuan di Indonesia, Arzeti Bilbina Setyawan, *Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak-Hak Kekerasan Seksual*.
- Rahman, Abdul. *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak (Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif, dan Hukum Islam)*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Santoso, Anugrah. *Aspek-aspek Kenakalan yang dilakukan Anak Analisis Sosiologi, Kriminologis, dan Yuridis, Skripsi*. Makassar: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin, 2012.
- Santing, Waspada. *Profesi Jurnalistik Perspektif Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- Sutedjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Reflika Aditama, 2006.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Perundangan tentang Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustita, 2010.
- Tim Redaksi Pustaka Yustita, *Kitab Lengkap KUHP, KUHP, KUHP, KUHP, KUHD*. Yogyakarta: Pusataka Yustita, 2013.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Wahid, Abdul & Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2001.

Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Wahyuni, Ina. *Jarimah Zina dan Pembuktiannya menurut Hukum Islam*, jptianin-gdl-s1 pdf. (2006).



Pedoman Wawancara

Wawancara Hakim

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi anak dibawa umur melakukan tindak pidana perkosaan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan?
3. Apakah ada pertimbangan hakim dalam memberikan tuntutan terhadap pelaku yang masih dibawa umur?
4. Apakah ada perbedaan tuntutan terhadap pelaku dibawa umur dengan pelaku yang sudah dewasa?

Wawancara Ketua Muhammadiyah Sul-Sel

1. Bagaimana pandangan hukum Islam melihat tentang anak yang melakukan tindakan pemerkosaan?
2. Apakah ada perbedaan hukuman terhadap pelaku orang dewasa dan anak dalam pandangan hukum Islam?
3. Menurut Bapak, apakah ada perlindungan hukum dalam Islam tentang korban pelaku tindak pidana pemerkosaan?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Hardian Vina Kalla, lahir di Mamuju pada tanggal 24 Maret 1995 Sulawesi Barat. Penulis adalah anak ke-3 dari empat bersaudara dan merupakan buah hati dari pasangan A. Muh. Kalla dan Rahmawati Palewai.

Penulis mulai menempuh Jenjang pendidikan Formal pada tahun 2001, yaitu di SD Negeri 1 Papalang, kemudian menempuh Pendidikan ke bangku SMPN tepatnya SMP Negeri 5 Kalukku, dan pada tahun 2009 penulis melanjutkan jenjang pendidikan ketingkat SMU pada SMK Negeri 1 Papalang di Kab. Mamuju sampai tahun 2012 dan pada Tahun yang sama penulis tercatat sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Adapun pengalaman organisasi penulis di Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan sebagai Koordinator Umum, serta ikut berperan aktif dalam Organisasi Himpunan Mahasiswa Bidikmisi (HIMABIM) pada tahun 2014.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R